

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PEKANBARU

**MANAJEMEN LAYANAN INFORMASI PEMERINTAH DAN
MASYARAKAT (InPAS) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Serta Melengkapi Salah Satu Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu-1
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau



OLEH:

ANDHIKA ASMARA
1601110450

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU

2020

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ANDHIKA ASMARA
NOMOR MAHASISWA : 1601110450
JURUSAN : ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JUDUL SKRIPSI : MANAJEMEN LAYANAN INFORMASI
PEMERINTAH DAN MASYARAKAT (InPAS)
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR TAHUN 2018

Diajukan untuk memenuhi serta melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SI) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Menyetujui:
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Adlin, S.Sos, M.Si
NIP. 19810208 200812 1 001

Pekanbaru, 1 Juni 2020

Pembimbing,



Dr. Muchid, S.Sos, M.Phil
NIP.19680717 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Diterima Oleh Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)

Nama : Andhika Asmara
NIM : 1601110450
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Tanggal Ujian : 9 Juli 2020, Pukul 10.00 WIB
Judul Skripsi : Manajemen Layanan Informasi Pemerintah Dan Masyarakat (InPAS) Oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018

TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

	Tanggal	Tanda Tangan
Ketua Tim Drs. H. Isril, MH NIP. 19590926 198601 1 002	_____	_____
Sekretaris Tim Rury Febrina, S.IP, M.Si NIP.19870223 201404 2 001	_____	_____
Anggota Adlin, S.Sos, M.Si NIP. 19810208 200812 1 001	_____	_____
Anggota Dr. Muchid, S.Sos, M.Phil NIP. 19680717 200003 1 001	_____	_____

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Dekan

Dr. Syafri Harto, M.Si
NIP. 19670913 199303 1 002

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andhika Asmara

Nomor Mahasiswa : 1601110450

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Judul Skripsi : Manajemen Layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS) oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah asli dan tidak dilakukan atas dasar plagiat.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus dan tidak berhak atas gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 1 Juni 2020

ANDHIKA ASMARA
NIM. 1601110450

MANAJEMEN LAYANAN INFORMASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT (InPAS) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

Oleh: ANDHIKA ASMARA

Email :kapalpocah97@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintah, Fisip, Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

ABSTRAK

Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS merupakan sebuah program berbasis teknologi informatika dan praktis terhadap berbagai kebutuhan informasi, agar mudah diakses dan dipergunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Masyarakat dalam memberikan partisipasinya sebagai ruang komunikasi dan ruang informasi yang lebih harmonis, cepat dan dipercaya. Permasalahan pada penelitian ini adalah belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Manajemen layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018.

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Lokasi penelitian berada di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dan PPID Kabupaten Indragiri Hilir. Jenis dan sumber data penelitian dibagi atas data primer dengan teknik pengambilan informan secara purposif dan data sekunder berupa data-data penunjang terkait InPAS. Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan menggunakan analisa kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa *pertama*, Manajemen layanan InPAS oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 telah dilakukan dengan kurang optimal dimana dalam menjalankan fungsi manajemennya terkait penerapan *E-Government* belum menunjukkan tahap kesempurnaan. Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan InPAS masih memiliki kendala. *Kedua*, Faktor penentu keberhasilan implementasi penerapan Informasi Pemerintah dan Masyarakat dalam manajemen layanan InPAS di Kabupaten Indragiri Hilir salah satunya Perangkat Hukum sebagai dasar hukum InPAS tersebut.

Kata Kunci :Manjemen Layanan, E-Government, InPAS

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan segala nikmat dan kasih-Nya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat di selesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Penulisan skripsi dengan judul **“Manajemen Layanan Informasi Pemerintah Dan Masyarakat (InPAS) Oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018”** merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana strata satu (1) pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Shalawat beriring salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan seluruh sahabat, hingga dakwah yang selama ini diperjuangkan dapat menjadi cahaya dalam kehidupan. Semoga suri tauladan beliau senantiasa mewarnai dan menafasi segala derap langkah dan aktivitas kita. Aamiin Allahumma Aamiin. Penghormatan dan penghargaan yang istimewa dan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada yang paling tercinta dan tersayang Ibunda Hadijah dan Ayahanda Abd. Khalid serta abang, kakak dan ponakan tercinta , atas segala pengorbanan, dukungan moril dan materil dan kasih sayang yang terus mendoakan dan mendukung dalam kehidupan penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan penjagaan serta kasih-Nya untuk Ibunda, Ayahanda serta abang, kakak dan ponakan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik moril dan materil, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Dr. Syafr Harto, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
2. Bapak Adlin, S.Sos, M.Si, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
3. Bapak Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP, Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau yang memberikan pengesahan dalam pengajuan judul proposal skripsi.
4. Bapak Dr. Muchid, S.Sos, M.Phil, Dosen Pembimbing, terimakasih atas segala waktu dan bimbingan, perhatian dan dukungan yang telah ibu berikan kepada penulis.
5. Bapak Drs. H. Isril, MH Pembimbing Akademis
6. Segenap Dosen pengajar dan staff pegawai di lingkungan FISIP UR khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan yaitu Bang Eron dan Kak Srik yang pernah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.
7. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Indragiri Hilir serta Para Narasumber yang telah menyediakan waktu untuk diwawancarai yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan khususnya angkatan 2016 yang telah menghadirkan masa-masa luar biasa selama penulis menjalani pendidikan disini.

Akhir kata dengan selesainya skripsi ini semoga memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, khususnya bagi penulis sendiri dan diharapkan bisa menjadi sumber referensi untuk penelitian sejenis kedepannya. Terimakasih.

Wassalamu'alaikun Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 1 Juni 2020

Penulis,

ANDHIKA ASMARA

NIM. 1601110450

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR BAGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	13
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	14
1.3.1 Tujuan Penulisan	14
1.3.2 Manfaat Penulisan	14
1.4 Tinjauan Pustaka	15
1.4.1 Studi Terdahulu	15
1.4.2 Kerangka Teori	19
a. Manajemen Pemerintahan	19
b. Faktor Penentu Tingkat Kesiapan <i>E-government</i> di Daerah	23
1.5 Kerangka Berpikir	28
1.6 Definisi Konseptual	29
1.7 Metode Penelitian	29
1.7.1 Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian	29
1.7.2 Lokasi, Waktu dan Ruang Lingkup Penelitian	30
1.7.3 Jenis dan Sumber Data	32
1.7.4 Teknik Pengumpulan Data	34
1.7.5 Teknik Analisis Data	35
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
2.1 Deskripsi Umum Kabupaten Indragiri Hilir	36
2.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hilir	36
2.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Indragiri Hilir	41
2.2 Profil Dinas Kominfo PS Kabupaten Indragiri Hilir	44
2.2.1 Sejarah Singkat Dinas Kominfo PS Kabupaten Indragiri Hilir	44
2.2.2 Kedudukan	45
2.2.3 Visi, Misi dan Tujuan	46
2.2.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	47
2.2.5 Sumber Daya Dinas	50
2.3 Profil Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS)	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Manajemen Layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS)	55
3.1.1 Perencanaan InPAS	56
3.1.2 Pengorganisasian InPAS	68
3.1.3 Penggunaan InPAS	77

3.1.4	Kontrol InPAS	83
3.2	Faktor Penentu Tingkat Kesiapan <i>E-Government</i> pada Layanan InPAS...	85
3.2.1	Infrastruktur Telekomunikasi	85
3.2.2	Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI oleh Pemerintah.....	89
3.2.3	Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintah	92
3.2.4	Ketersediaan Dana dan Anggaran	95
3.2.5	Perangkat Hukum	97
3.2.6	Perubahan Paradigma	101
BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan.....	105
4.2	Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA		106
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hasil PeGI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tingkat Kab/Kota di Provinsi Riau	3
Tabel 1.2	Detail Aplikasi InPAS	4
Tabel 1.3	Layanan pada InPAS	4
Tabel 1.4	Deskripsi Permasalahan yang dihadapi Dinas Kominfo PS Kabupaten Indragiri Hilir	10
Tabel 1.5	Sarana dan Prasarana Dinas Kominfo PS Indragiri Hilir.....	11
Tabel 1.6	Pegawai Dinas Kominfo PS Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Diklat Struktural.....	12
Tabel 1.7	Informan Penelitian	34
Tabel 2.1	Nama Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 1965-2020.....	41
Tabel 2.2	Batas Kabupaten Indragiri Hilir	42
Tabel 2.3	Pegawai Dinas Kominfo PS Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin	50
Tabel 2.4	Pegawai Dinas Kominfo PS Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Pendidikan Formal.....	51
Tabel 2.5	Pegawai Dinas Kominfo PS Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Pangkat.....	41
Tabel 2.6	Lembar Kerja Kegiatan Pelayanan Informasi	53
Tabel 2.7	Pelaksana Kegiatan Lembar Kerja	53
Tabel 2.8	Anggaran InPAS.....	54
Tabel 3.1	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Jaringan Hingga Kepedesaan.....	57
Tabel 3.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas KominfoPS Kabupaten Inhil	58
Tabel 3.3	Program dan Indikator Kinerja InPAS.....	66
Tabel 3.4	Realisasi dan Target Program InPAS	68
Tabel 3.5	Pelaksana Kegiatan InPAS.....	77
Tabel 3.6	Standar Operasional Penyusunan DIP	78
Tabel 3.7	Proses Pengkoreksian Informasi dan Dokumentasi InPAS	80
Tabel 3.8	Peralatan dan Perlengkapan Penyusunan DIP.....	87
Tabel 3.9	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir	93
Tabel 3.10	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi DiskominfoPS Inhil.....	94
Tabel 3.11	Kendala Internal dan Strategi Mengatasi Kendala	96
Tabel 3.12	Anggaran Program Pengembangan InPAS	97
Tabel 3.13	Perangkat Hukum InPAS	98
Tabel 3.14	Kriteria Keberhasilan Diskominfo PS Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pelaksanaan InPAS	100
Tabel 3.15	Perubahan paradigma Masyarakat Sebelum dan Sesudah Adanya InPAS	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kominfo PS Kabupaten Indragiri Hilir	49
--	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Berfikir	28
Bagan 2 Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.....	69
Bagan 3 Pelaksana Program InPAS dalam Penyusunan DIP.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan sehubungan dengan hal tersebut yaitu mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kemajuan teknologi informasi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang baik *good governance* salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut *E-Government*.

E-Government dalam gambaran umum adalah alat pemerintahan yang berbasis elektronik agar pengerjaan di pemerintahan bisa lebih efisien/ transparan dan lebih cepat. Dalam (Arief, 2016) Penerapan teknologi informasi dipemerintahan adalah merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Ketika ada data yang ingin disampaikan ke masyarakat bisa lebih mudah untuk disampaikan. *E-Government* membantu pemerintahan dan masyarakat, walaupun *e-government* cenderung lebih menggunakan teknologi, misalnya dulu ketika hendak mengirim surat ke OPD harus di antar secara lengkap, tetapi sekarang dengan adanya *e-government* dapat dikirimkan melalui email dengan menggunakan aplikasi InPAS.

Di era keterbukaan informasi publik yang telah menjadi kebutuhan utama masyarakat, pemerintah semakin dituntut untuk lebih memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai pelayan publik. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (KominfoPS) tidak hanya sekedar tampil sebagai tim perancang beragam perangkat Teknologi Informasi Komunikasi dan komunikator penyampai pesan dari berbagai kebijakan pemerintah saja. Akan tetapi juga harus menjalankan peran gandanya sebagai humas pemerintah serta menciptakan masyarakat melek IT yang juga mampu memproduksi informasi. Melalui *new media*, peran dan fungsi Dinas KominfoPS dalam mempublikasikan program *e-government* sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dinas Kominfops Kabupaten Indragiri Hilir merupakan instansi pemerintah di bidang IT yang mencoba memfasilitasi segala kebutuhan IT warganya agar dapat melek IT sekaligus diharapkan mampu memproduksi konten informasi, sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Zweers and Planque dalam (Gunawan, 2015) memberikan definisi, *E-Government* berhubungan dengan penyedia informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronik, dengan dan oleh pemerintah tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan. Konsep *e-government* bukanlah sebuah inisiatif yang mudah dan murah. Rekam jejak perjalanan *e-Government* di Provinsi Riau secara formal dapat kita lihat pasang-surutnya berdasarkan hasil Survei Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) Kementerian Kominfo. Berikut disajikan data PeGI Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau :

Tabel 1.1
Hasil PeGI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tingkat
Kab/Kota di Provinsi Riau

No.	Kabupaten/ Kota	Nilai Rata-rata	Kategori
1.	Kota Dumai	2.32	Kurang
2.	Kab. Kampar	2.13	Kurang
3.	Kab. Kuantan Singingi	2.06	Kurang
4.	Kab. Pelalawan	1.98	Kurang
5.	Kab. Siak	1.75	Kurang
6.	Kota Pekanbaru	1.65	Kurang
7.	Kab. Indragiri Hilir	1.64	Kurang
8.	Kab. Bengkalis	1.57	Sangat Kurang
9.	Kab. Rokan Hilir	1.41	Sangat Kurang
10.	Kab. Indragiri Hulu	1.16	Sangat Kurang
11.	Kab. Rokan Hulu	1.14	Sangat Kurang
12.	Kab. Kep. Meranti	1.00	Sangat Kurang

Sumber : Survei PeGI Kominfo

Dari keseluruhan Kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau, kesemuanya mendapatkan predikat kurang. Ini membuktikan bahwa penerapan *e-Government* pada pemerintah daerah (kabupaten dan kota) yang ada di Provinsi Riau masih jauh dari harapan, dimana nilai rata-rata dari 5 dimensi PeGI sebesar hanya sebesar 1,65 atau berada pada kategori “kurang”, Kabupaten Indragiri Hilir masuk kategori kurang dengan nilai rata-rata 1.64.

Dalam (Indrajid, 2005) Sebelum memutuskan untuk mengalokasikan sejumlah sumber daya yang sangat besar, harus dimengerti dahulu latar belakang apa yang menyebabkan inisiatif *e-government* perlu (atau tidak) untuk diimplementasikan. Tujuan utama dari penerapan InPAS ini adalah agar warga Indragiri Hilir tidak gagap teknologi (gaptek) di era serba digital. Hal ini sekaligus sebagai upaya dari Dinas KominfoPS Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyiapkan segala sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Indragiri Hilir, karena menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tentu dengan

perkembangan dan akses yang mudah akan memiliki dampak perkembangan yang sangat cepat baik dalam perorangan, bisnis, maupun bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut ini disajikan tabel detail aplikasi Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS) sebagai berikut :

Tabel 1.2
Detail Aplikasi Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS)

No.	Info Aplikasi	Keterangan
1.	Versi	1.6
2.	Update pada	9 Februari 2019
3.	Download	100+ download
4.	Ditawarkan oleh	Diskominfo PS Kab. Inhil
5.	Dirilis tanggal	14 Juli 2018
6.	Rating	3+

Sumber : Dinas Kominfo PS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik resmi meluncurkan sistem Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS), Senin (16/7/2018) malam. Layanan yang terdapat di aplikasi InPAS dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Layanan pada Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS)

No.	Menu	Layanan
1.	Dashboard	GGTV (Gemilang Televisi), SIAP POL PP INHIL (Sistem Informasi Terpadu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Inhil, Cloud Inhilkab, e-berTanjak, e-PAD, eMonev, ePerizinan, ePlanning, Gudang Data, Hotspot Area, Inhilkab Hosting, Inhilkab Main, JDIH, Lapori, LPSE, Media Center, PPID, SiPAMIL (ePengaduan), SIPKD, WebGIS Jalan & Jembatan dan WebGIS Sarana & Prasarana.
2.	Kabar OPD	Berisi berita terkait Organisasi Perangkat Daerah
3.	Kabar Masyarakat	Berisi berita tentang masyarakat yang ditulis langsung oleh masyarakat.

Sumber : Dinas Kominfo PS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019

Terbatasnya akses informasi dan dilaksanakan sebagai wujud tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan latar belakang lahirnya ide sistem aplikasi InPAS ini. InPAS merupakan sebuah program berbasis internet yang tengah dikembangkan DiskominfoPS Inhil dengan tujuan untuk mempermudah akses informasi pemerintahan oleh masyarakat Indragiri Hilir secara luas. Melalui aplikasi ini, merupakan bagian pemanfaatan kemajuan di bidang teknologi informasi ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka optimalisasi keterbukaan informasi publik sesuai amanah UU Nomor 14 Tahun 2008. Diharapkan operator mampu menyampaikan berita-berita yang berkualitas melalui InPAS.

Melalui InPAS, semua lapisan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir berkesempatan bisa belajar beragam materi pelatihan TIK tanpa ada pungutan. InPAS berupaya meningkatkan pelayanannya agar dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir sebagai upaya percepatan menuju *visi Spirit Baru Indragiri Hilir yang Lebih Maju, Bermartabat dan Bermartabat melalui pelayanan informasi publik dengan sistem E-Government*. Yaitu konsep kota modern berbasis teknologi informasi yang saat ini telah banyak diterapkan di sejumlah kota besar di seluruh dunia, sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya kebutuhan masyarakat yang ingin mengakses informasi dan berkomunikasi dengan mudah dan cepat.

Instruksi Presiden No. 6/2001 tanggal. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintahan harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Lebih jauh lagi, *e-government*

wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda diberbagai kantor-kantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area dimana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasar dan mensimplifikasi hubungan antar masyarakat dan pemerintah.

Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan Komunikasi dan Informatika dikategorikan kedalam urusan pemerintahan bersifat konkuren hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 2. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi komunikasi dan informatika.

Upaya pengelolaan program Informasi Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah daerah memberikan wewenang kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pasal 2 ayat (1) “Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. *Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;*
- b. *Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;*
- c. *Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;*
- d. *Pembinaan teknis penyenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; dan*
- e. *Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.*

Dasar program InPAS daerah adalah Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 20 Tahun 2018 Tentang Manajemen Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Pengelolaan program Informasi Pemerintah dan Masyarakat Bagian Kesatu Pengelola Pogram InPas Daerah Pasal 8 yaitu:

- (1) *Dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b), maka perlu dibuat Pengelola Program InPas Daerah.*
- (2) *Dalam memberikan pelayanan informasi publik, Pengelola Program InPas Daerah menerapkan sistem terpusat satu pintu atau sentralistik.*

- (3) *Setiap permintaan informasi publik yang ditujukan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah, di ajukan melalui Pengelola Program InPas Daerah.*
- (4) *Pengelola Program InPas daerah di kelola oleh PPID Utama sebagai pelaksana dan penanggungjawab pelaksanaannya.*

Dengan berbekal kemampuan mengapresiasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Dinas KominfoPS Kabupaten Indragiri Hilir bertekad memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari sistem dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir atau lebih dikenal *e-government*. Dalam penyelenggaraan *e-government* Dinas KominfoPS telah membangun infrastruktur jaringan komunikasi di seluruh OPD dan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk Implementasi *e-government* sistem yang sudah di bangun dan dalam tahap penyempurnaan antara lain Program-program KominfoPS akan disejalankan dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan visi spirit baru Indragiri Hilir yang lebih maju, Bermarwah dan bermartabat, adapun upaya yang menjadi prioritas saat ini, penataan tower telekomunikasi dengan revisi Perda, pelayanan informasi publik dengan sistem *e-government*, membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kecamatan dan Desa serta meningkatkan kemitraan dengan media massa di kabupaten Indragiri Hilir sebagai akses informasi bagi masyarakat.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan / atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan. PPID Utama dalam layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan,

Pelayanan, Penyediaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang selanjutnya disingkat PPID Pembantu adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, penyebarluasan dan / atau pelayanan informasi pada Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dan bertanggung jawab langsung kepada PPID Utama.

Permasalahan dalam penelitian ini salah satunya belum berkembangnya integrasi jaringan seluruh SKPD yang didukung dengan implementasi teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan *database* sehingga implementasi *e-government* belum sepenuhnya didukung oleh data akurat, cepat dan tepat. Untuk lebih memfokuskan penelitian yang akan dilakukan maka dilakukan analisis untuk mengukur tingkat *Urgent, Serious, Growth (USG)* yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 1.4
**Deskripsi Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika,
 Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir**

No.	Deskripsi Permasalahan	U	S	G	Jumlah Total	Prioritas
1	Belum tersedianya sistem keterbukaan informasi berbasis teknologi	5	5	4	14	I
2	Belum dikelola secara baik, cepat dan akurat informasi dari OPD dan Masyarakat	4	5	3	12	II
3	Belum memiliki informasi yang cepat dan akurat	4	3	4	11	III
4	Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap kewajiban memberi informasi	3	3	4	10	IV
5	Belum tersedia tempat informasi/ berita aktual dari masyarakat.	3	3	3	9	V

Sumber: Dinas Komunikas iInformatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Keterangan Predikat :

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Sangat Kecil | U. Urgent |
| 2. Kecil | S. Serious |
| 3. Sedang | G. Growth |
| 4. Besar | |
| 5. Sangat Besar | |

Hasil analisis terhadap deskripsi permasalahan melalui Metode USG yang menjadi skala prioritas adalah pada area implementasi teknologi informasi dan komunikasi. Dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang kurang memadai menghambat Dinas KominfoPS dalam mewujudkan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Indragiri Hilir. Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki Dinas Kominfops Kabupaten Indragiri Hilir disajikan tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan
Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

No	Jenis Asset	Jumlah	Kondisi	Tahun
1.	Bangunan gedung Media Center	1	Baik	2015
2.	Concrete Tower	1	Baik	2001
3.	PC UNIT/ Komputer PC (Komputer Editing Audio/ Rakitan)	1	Baik	2016
4.	Komputer Mainframe (Server Data Center)	2	Baik	2017
5.	Komputer Mainframe (Proxy Server)	1	Baik	2017
6.	Komputer Mainframe (Server Call Center)	1	Baik	2017
7.	PC Unit (Komputer untuk pelayanan)	3	Baik	2017
8.	PC Unit (Komputer untuk website)	2	Baik	2017
9.	PC Unit (Komputer untuk Aplikasi)	3	Baik	2017
10.	Patch Panel 24 PORT	1	Baik	2017
11.	Rack Server	1	Baik	2017
12.	Switch 24 PORT	2	Baik	2017
13.	Wireless Mobile P2P	2	Baik	2017
14.	Website Diskominfops Kabupaten Inhil	1	Baik	2017
15.	Website Media Center Kabupaten Inhil	1	Baik	2017
16.	Website PPID Kabupaten Inhil	1	Baik	2017

Sumber : Dinas Kominfops Kabupaten Indragiri Hilir

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir memiliki keterbatasan dari segi jumlah dalam sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang mempunyai latar belakang teknis dan kecilnya peluang dalam mengikuti Diklat atau Pendidikan dan Pelatihan. Jumlah pegawai Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 90 orang Pegawai. Dimana terdiri dari 30 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 60 tenaga kontrak/ honorer. Berikut disajikan Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Diklat Stuktural:

Tabel 1.6
Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Diklat Struktural

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH PNS
1	SPAMEN / PIM II	1
2	SPAMA / PIM III	2
3	ADUM / ADUMLA / PIM IV	4

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

DiskominfoPS Kabupaten Indragiri Hilir memiliki peran untuk mengelola penyelenggaraan data elektronik, melakukan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kegiatan dibidang infrastruktur teknologi, pengembangan pengelolaan aplikasi serta keamanan informasi dan komunikasi. Namun permasalahan yang muncul dalam pengembangan *E-Government* di Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir tersebut antara lain :

- a. Belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Sehingga belum berkembangnya integrasi jaringan seluruh SKPD yang didukung dengan implementasi teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan *database* sehingga implementasi *e-government* belum sepenuhnya didukung oleh data akurat, cepat dan tepat.
- b. Kurang optimalnya sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang kurang memadai menghambat Dinas KominfoPS dalam mewujudkan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Indragiri Hilir.

- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang mempunyai latar belakang teknis dan kecilnya peluang dalam mengikuti Diklat atau Pendidikan dan Pelatihan.

Berdasarkan pemikiran diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai Upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Mewujudkan Teknologi Informasi Publik dengan judul penelitian yaitu **“Manajemen Layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS) Oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti diajukan dalam pertanyaan penelitian adalah :

- 1) Bagaimana manajemen layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS) oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018?
- 2) Apa sajakah yang menjadi faktor penentu keberhasilan manajemen layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS) oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan ;

- 1) Untuk mendeskripsikan manajemen layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS) oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
- 2) Untuk melihat faktor apa saja yang menjadi penentu manajemen layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS) oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat secara akademis, sebagai bahan kajian ilmiah dan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan Ilmu Pemerintahan khususnya tentang manajemen pengelolaan Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPas) oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018.
- 2) Manfaat secara praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir agar dapat meningkatkan pencapaian *E-Government* pada pelayanan di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir.

1.4 Tinjauan Pustaka

1.4.1 Studi Terdahulu

Tabel 1.7
Studi Terdahulu

No.	Indikator	Keterangan
1	Nama dan Judul Penelitian	Lydia Iswandi dengan judul Pengembangan <i>E-Government</i> Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau Tahun 2016 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
	Teori	Tahapan pengembangan <i>E-Government</i> menurut Inpres No. 3 Tahun 2013.
	Metodologi Penelitian	Metode kualitatif
	Hasil Penelitian	Faktor penghambat pelaksanaan <i>E-Government</i> yang dialami oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau. Salah satu faktor penghambatnya ialah terbatasnya anggaran, kurang maksimalnya ketersediaan informasi data umum, data pembangunan dan data lainnya.
	Perbedaan	Perbedaan terletak pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Teori yang digunakan b. Lokasi, Waktu dan Ruang Lingkup Penelitian
2	Nama dan Judul Penelitian	Sri Wulandari dengan judul “Pengelolaan Media <i>Online Website</i> dalam Penyebarluasan Informasi Publik oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2016” Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
	Teori	Konsep Good Governance (UNDP mengembangkan sembilan prinsip atau karakteristik good governance yang saling menguatkan)
	Metodologi Penelitian	Metode Kualitatif
	Hasil Penelitian	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau pada dasarnya telah melaksanakan penyebaran informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, namun terdapat beberapa kendala yang dialami dalam pelaksanaan tersebut hingga menjadikan pelaksanaan pengelolaan <i>website</i> kurang optimal

		padatahun 2016.
	Perbedaan	Perbedaan terletak pada: c. Teori yang digunakan d. Lokasi, Waktu dan Ruang Lingkup Penelitian
3	Nama dan Judul Penelitian	Anita Yuniati Sinaga dengan judul “Partisipasi Politik Virtual pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 (Studi Partisipasi Politik Melalui <i>Facebook</i>)” Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau.
	Teori	Teori Partisipasi Politik dan Demokrasi Digital
	Metodologi Penelitian	Metode Kuantitatif
	Hasil Penelitian	Responden yang berasal dari akun <i>Facebook</i> Syamsuar-Edy tingkat partisipasi politik virtualnya di <i>Facebook</i> termasuk pada kategori aktif dengan rekapitulasi skor rata-rata 1,68 dan responden yang berasal dari akun <i>Facebook</i> Lukman Edy-Hardianto (Riau Bangkit) tingkat partisipasi politik virtualnya di <i>Facebook</i> termasuk pada kategori cukup aktif dengan rekapitulasi skor rata-rata 1,24. Dengan demikian tidak ada korelasi antara banyaknya jumlah <i>followers</i> dan perolehan suara pada pemilihan kepala daerah di provinsi Riau tahun 2018. Pada realita yang ada <i>followers Facebook</i> Syamsuar-Edy lebih aktif dalam melakukan partisipasi politik virtual melalui <i>Facebook</i> dibandingkan dengan <i>followers Facebook</i> Lukman Edy-Hardianto, maka tepat bila Syamsuar-Edy dapat memperoleh suara terbanyak.
	Perbedaan	Perbedaan terletak pada: a) Teori yang digunakan b) Metodologi penelitian c) Lokasi, Waktu dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Lydia Iswandi dengan judul Pengembangan *E-Government* Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau Tahun 2016 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Menggunakan metode kualitatif, hasil

penelitian yang dilakukan menghasilkan beberapa faktor penghambat pelaksanaan E-Government yang dialami oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau. Salah satu faktor penghambatnya ialah terbatasnya anggaran, kurang maksimalnya ketersediaan informasi data umum, data pembangunan dan data lainnya.

“Pengelolaan Media *Online Website* dalam Penyebarluasan Informasi Publik oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2016” oleh Sri Wulandari Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau pada dasarnya telah melaksanakan penyebaran informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, namun terdapat beberapa kendala yang dialami dalam pelaksanaan tersebut hingga menjadikan pelaksanaan pengelolaan *website* kurang optimal padatahun 2016. Berbagai kendala yang dialami berasal dari kualitas sumber daya pengelola *website* tersebut, karena kurangnya komitmen pengelola dalam meyebarkan informasi tersebut menjadikan pelaksanaan pengelolaan *website* kurang optimal padatahun 2016. Namun berbeda dengan saat ini, pengelolaan *website* di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau sudah banyak mengalami peningkatan. Faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan *website* dalam penyebarluasan informasi publik oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau ialah beberapa ruang pada *website* tidak terisi informasi yang seharusnya, hal itu disebabkan kurangnya komitmen pengelola *website* yang

berasal dari OPD-OPD terkait. Selain itu keterbatasan anggaran, serta SOP yang kurang terstruktur juga menjadi sebuah hambatan dalam pengelolaan *website*.

“Partisipasi Politik Virtual pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 (Studi Partisipasi Politik Melalui *Facebook*)” yang dilakukan oleh Anita Yuniati Sinaga berasal dari Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau. Hasil dari penelitian ini adalah Responden yang berasal dari akun *Facebook* Syamsuar-Edy tingkat partisipasi politik virtualnya di *Facebook* termasuk pada kategori aktif dengan rekapitulasi skor rata-rata 1,68 dan responden yang berasal dari akun *Facebook* Lukman Edy-Hardianto (Riau Bangkit) tingkat partisipasi politik virtualnya di *Facebook* termasuk pada kategori cukup aktif dengan rekapitulasi skor rata-rata 1,24. Dengan demikian tidak ada korelasi antara banyaknya jumlah *followers* dan perolehan suara pada pemilihan kepala daerah di provinsi Riau tahun 2018. Pada realita yang ada *followers Facebook* Syamsuar-Edy lebih aktif dalam melakukan partisipasi politik virtual melalui *Facebook* dibandingkan dengan *followers Facebook* Lukman Edy-Hardianto, maka tepat bila Syamsuar-Edy dapat memperoleh suara terbanyak. Faktor pendorong yang paling berpengaruh bagi *followers* yang berasal dari akun *Facebook* Syamsuar-Edy adalah faktor keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Untuk *followers* yang berasal dari akun *Facebook* Lukman Edy-Hardianto, faktor terbanyak yang mendorong responden untuk melakukan partisipasi politik virtual melalui *Facebook* adalah Modernisasi. Faktor penghambat untuk melakukan partisipasi politik melalui *facebook* lebih banyak yang berasal dari pendekatan teknis dibandingkan dengan dua pendekatan lainnya.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus penelitian diantaranya Teori yang digunakan, Metodologi penelitian, Lokasi, Waktu dan Ruang Lingkup Penelitian. Pada penelitian ini penelitian berfokus pada Manajemen layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS) oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan perbedaan selanjutnya peneliti menggunakan teori Manajemen Pemerintahan dan Faktor tingkat *kesiapan E-Government* di Daerah. Selain itu lokasi dan waktu penelitian juga berbeda. Penelitian yang dilakukan di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dan PPID Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018.

1.4.2 Kerangka Teori

a. Manajemen Pemerintahan

Menurut (Nawawi, 2013) Pihak manajemen harus responsif dengan perkembangan ini dengan melakukan sejumlah penyesuaian, kemudian mengambil manfaat atau keuntungan dari sejumlah perubahan tersebut. Misalnya dengan mengadopsi sistem apa yang sering disebut *e-government*. Jika tugas dan fungsi manajemen itu meliputi fungsi *planning, organizing, actualing*, dan *controlling* atau yang sering dingkat POAC, maka jika disederhanakan ke dalam perspektif teknologi informasi (IT), pada dasarnya tugas umum manajemen pemerintahan adalah melayani masyarakat yang didalamnya berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyebaran data maupun informasi yang penting bagi masyarakat.

Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 (Ndraha, 2011), antara lain :

1) Perencanaan Pemerintahan;

Dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) organisasi.

Menurut Nurman (Nurman, 2017) manajemen sangatlah berperan dalam organisasi termasuk organisasi pemerintahan dimana terdapat fungsi-fungsi manajemen yang bekerja didalam pemerintahan di antaranya, fungsi perencanaan yang bersifat strategik yang dilakukan oleh pemerintah yang diyakini seiring berjalannya waktu pemerintah akan lebih banyak menjalankan fungsi perencanaan pada pemerintahan yang dijalankannya demi tercapainya tujuan dari negara. Sedangkan fungsi yang bersifat taktis dan operasional dibuat oleh perancangannya. Untuk menyusun perencanaan strategik, organisasi pemerintah perlu didukung oleh pegawai yang memiliki wawasan luas dan jangkauan pandangan ke masa depan.

Menurut (Indrajid, Tata Kelola Teknologi Informasi, 2016) proses tata kelola teknologi informasi yang harus diperhatikan adalah menyusun rencana strategis teknologi informasi. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan teknologi informasi di sebuah institusi sangatlah penting untuk menjamin bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki diarahkan demi kepentingan dan kebutuhan lembaga dimaksud. Keselarasan antara tujuan organisasi dengan program maupun portofolio proyek pembangunan teknologi informasi sangatlah penting untuk memastikan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

2) Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan;

Realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), maupun Sumber Daya Benda (SDB). Sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.

Menurut (Nurman, 2017) Bila dilihat dari fungsi pengorganisasian, manajemen pemerintahan bekerja dengan sistem jaringan. Semakin banyaknya jaringan yang bisa didapat pada saat ini akan memudahkan pemerintah dalam mengorganisasikan sesuatu. Kerja sama lintas fungsi dan lintas unit akan lebih banyak dilakukan. Dengan sendirinya hubungan kerja secara hierarki menjadi semakin berkurang.

Menurut (Indrajid, Tata Kelola Teknologi Informasi, 2016) dalam sebuah organisasi yang memanfaatkan teknologi informasi, perlu secara jelas dirumuskan peranan, fungsi, tugas dan tanggung jawab setiap individu yang mengelola maupun menggunakannya. Dengan semangat tata kelola organisasi yang baik (*good corporate governance*), harus ditetapkan siapa-siapa saja yang berhak dan bertanggung jawab terhadap penerapan serta pemeliharaan teknologi informasi berbasis asas transparansi dan akuntabilitas yang jelas. Pimpinan organisasi harus memastikan adanya strategi, aturan, kebijakan dan prosedur yang ditaati serta dipatuhi seluruh pemangku kepentingan.

3) Penggunaan sumber-sumber pemerintahan;

Dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan.

Menurut (Nurman, 2017) dengan adanya jaringan kerja, maka fungsi penggerakan akan lebih banyak berupa garis-garis kebijakan. Para anggota organisasi yang cerdas dan kreatif akan mampu menerjemahkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya. Dalam hal ini, delegasi wewenang diberikan kepada setiap anggota organisasi sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.

Menurut (Indrajid, Tata Kelola Teknologi Informasi, 2016) mengatakan bahwa dalam implementasinya, para pengguna atau *user*-lah yang akan memakai, menggunakan, menerapkan, atau mengoperasikan teknologi yang tersedia di organisasi atau perusahaan. Oleh karena itulah harus tersedia dokumen penerapan aplikasi yang dapat membantu pengguna dalam memahami dan mengoperasikan berbagai sistem yang ada di organisasi. Disamping itu diperlukan pula serangkaian pelatihan atau training bagi para pengguna agar lancar serta mahir mengoperasikan teknologi yang ada.

4) Kontrol pemerintahan;

Dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut.

Fungsi pengawasan dan pengendalian menurut (Nurman, 2017) yang dilaksanakan oleh manajemen pemerintahan justru akan semakin mendalam dan luas, seiring dengan membesarnya desentralisasi kegiatan pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk privatisasi. Tanpa adanya pengawasan dan pengendalian yang ketat akan terjadi suasana tanpa kendali.

Untuk memastikan efektivitas implementasi teknologi informasi dan komunikasi menurut (Indrajid, Tata Kelola Teknologi Informasi, 2016) dibutuhkan proses pengawasan dan pemantauan yang ketat. Indikator atau ukuran

kinerja haruslah ditetapkan sebagai acuan apakah sistem dimaksud telah bekerja sebagaimana target atau harapan yang diinginkan atau tidak. Dari waktu ke waktu, secara rutin maupun *ad-hoc*, harus dilakukan pengawasan dan pemantauan terhadap seluruh indikator yang dimaksud. Jika terjadi penyimpangan, harus segera dilakukan langkah-langkah untuk menanganinya, sehingga dilakukan intervensi agar kinerja sistem teknologi yang dimiliki kembali pada situasi seharusnya.

b. *Electronic Government*

Menurut (Indrajid, *e-Government in Action*, 2005), ada sejumlah faktor penentu yang patut menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat kesiapan sebuah daerah untuk menerapkan e-government yaitu:

1) Infrastruktur Telekomunikasi.

Dalam level pelaksanaannya, perangkat keras seperti komputer, jaringan dan infrastruktur akan menjadi faktor teramat penting dalam penerapan *e-government*. Secara ideal memang harus tersedia infrastruktur yang dapat menunjang target atau prioritas pengembangan *e-government* yang telah disepakati. Untuk daerah yang masih memiliki infrastruktur yang masih teramat sangat minim, adalah baik dipikirkan pola kerjasama dengan sejumlah pihak swasta guna mengundang mereka berinvestasi di daerah tersebut.

Dalam dunia penjaminan mutu, istilah yang kerap dipakai sebagai standar baku manajemen pengelolaan kualitas adalah QMS atau *Quality Management System*. Sebagai sebuah infrastruktur pendukung bisnis, teknologi informasi dan komunikasi harus memiliki standar kualitas yang jelas – untuk memastikan tercapainya kinerja sebagaimana diharapkan. Perlu diperhatikan, bahwa dari

waktu ke waktu, harus terjadi perbaikan kualitas. Pemenuhan sebuah standar bukanlah sasaran akhir dari sebuah manajemen kualitas. Organisasi atau perusahaan berdaya saing tinggi perlu memiliki kinerja teknologi informasi yang jauh melampaui standar umum.

2) Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI oleh Pemerintah.

Dengan mengamati sejauh mana pemerintah saat ini telah memanfaatkan beraneka ragam teknologi informasi dalam membantu kegiatan sehari-hari akan tampak sejauh mana kesiapan mereka untuk menerapkan konsep *e-government*, sudah menjadi rahasia umum bahwa meskipun banyak sekali lembaga internasional yang telah memberikan bantuan dana pinjaman atau hibah untuk membeli sejumlah teknologi perangkat keras bagi pemerintah, namun instrumen tersebut tidak dipergunakan secara maksimal dan banyak yang tidak dirawat sehingga kini sudah dalam kondisi rusak.

Menurut (Indrayani, 2013) komputerisasi dapat meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan daerah sekaligus menampung semakin banyaknya kebutuhan pengolahan data untuk pengambilan keputusan dan pelayanan publik.

3) Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintah.

Yang akan menjadi “pemain utama” atau subjek didalam inisiatif *e-government* pada dasarnya adalah manusia yang bekerja di lembaga pemerintahan, sehingga tingkat kompetensi dan keahlian mereka akan sangat mempengaruhi performa penerapan *e-government*. Semakin tinggi tingkat *information technology literacy* SDM di pemerintah, semakin siap mereka untuk menerapkan konsep *e-government*.

Menurut (Indrajid, Tata Kelola Teknologi Informasi, 2016) Teknologi informasi harus dikelola oleh orang-orang yang berkompeten di beragam bidang, seperti: jaringan, perangkat keras, aplikasi, *database*, data center, pelatihan, proses bisnis, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah maka proses perekrutan, penempatan, pengembangan, penguatan, penilaian, pengawasan, hingga pelepasan (terminasi) para personal teknologi informasi harus dikelola secara profesional.

4) Ketersediaan Dana dan Anggaran.

Pemerintah daerah tertentu harus memiliki jaringan yang cukup terhadap berbagai sumber dana yang ada dan memiliki otoritas untuk menggerakkannya. Dana yang dibutuhkan tidak sekedar investasi belaka, namun perlu pula dianggarkan untuk biaya operasional, pemeliharaan dan pengembangan dikemudian hari.

Menurut (Indrajid, Tata Kelola Teknologi Informasi, 2016) Demi memperoleh layanan teknologi informasi yang andal dan prima, dibutuhkan biaya atau sumber daya finansial dengan jumlah yang sesuai dengan fitur serta kualitas yang diinginkan. Oleh karena itulah maka setiap kebutuhan biaya harus dihitung secara cermat dan mendapatkan komitmen persetujuan pimpinan organisasi untuk dialokasikan atau dibayarkan kepada penyedia jasa layanan teknologi informasi.

5) Perangkat Hukum.

Karena konsep *e-government* sangat terkait dengan usaha penciptaan dan pendistribusian data / informasi dan hak cipta intelektual, misalnya akan merupakan hal yang perlu dilindungi oleh Undang-undang atau peraturan hukum yang dapat menjamin terciptanya mekanisme *e-government* yang kondusif.

Menurut (Indrajid, Tata Kelola Teknologi Informasi, 2016) Kebutuhan untuk menjaga validitas dan integritas data maupun informasi serta memproteksi berbagai aset teknologi informasi memaksa organisasi untuk menerapkan sejumlah proses terkait dengan manajemen keamanan sistem. Organisasi perlu mengembangkan sejumlah kebijakan, standar, maupun prosedur untuk mengelola aspek keamanan dimaksud. Keseluruhan peraturan tersebut haruslah dipantau implementasinya dan dipastikan efektivitasnya – terutama dalam hubungannya dengan usaha untuk menanggapi berbagai ancaman keamanan maupun menghadapi kelemahan/ kerawanan sistem yang dimiliki organisasi.

6) Perubahan Paradigma.

Perubahan paradigma ini akan bermuara pada dibutuhkannya kesadaran dan keinginan untuk mengubah cara kerja, bersikap, perilaku, dan kebiasaan sehari-hari. Jika para pemimpin dan karyawan di pemerintahan tidak mau berubah, maka dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan belum siap untuk menerapkan konsep *e-government*.

Sangat banyak proyek teknologi informasi yang gagal bukan pada tahap perancangan dan pembangunannya, namun pada saat implementasi atau penerapannya di organisasi atau perusahaan. Penyebab utamanya sangatlah klasik, seperti:

- a. Kebanyakan pengguna atau user yang terdiri dari manajemen maupun karyawan enggan atau tidak mau untuk berubah karena sudah nyaman dengan kondisi yang ada;
- b. Tidak adanya komitmen yang nyata dari pimpinan untuk membantu proses implementasi sehingga segenap jajaran sumber daya manusia

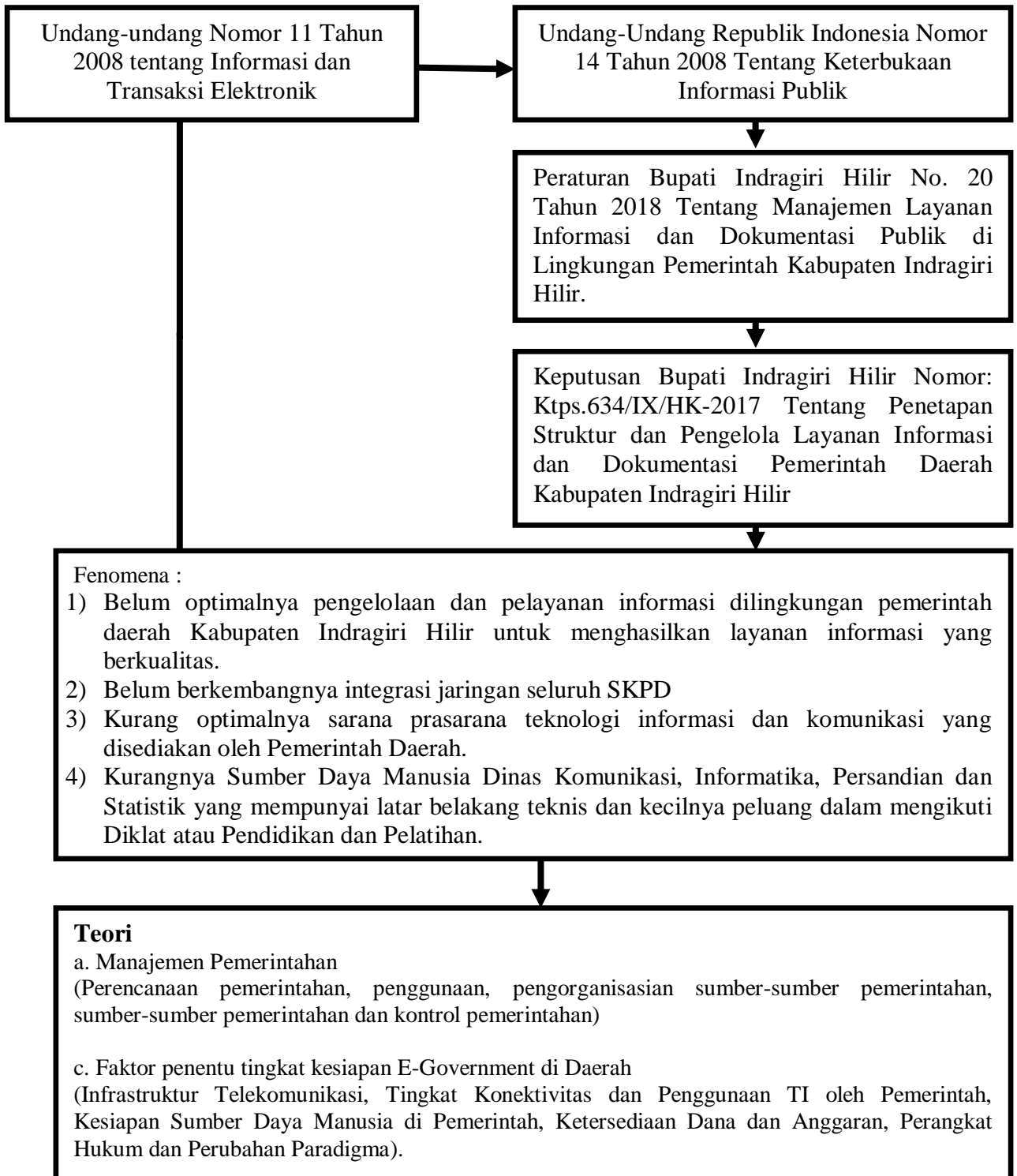
diperusahaan tidak begitu peduli terhadap keberadaan aplikasi baru yang ingin diterapkan;

- c. Resistansi dari sejumlah pihak yang lebih senang menggunakan cara kerja dengan sistem lama, apalagi secara politis mendapatkan dukungan dari vendor atau mitra teknologi yang ada;
- d. Komunikasi yang tidak lancar antara pihak-pihak yang bertanggung jawab maupun berkepentingan dengan penerapan teknologi informasi sehingga tidak terdapat kejelasan mengenai keberadaan, strategi, pendekatan, kepentingan, peta pandu, dan lain sebagainya;
- e. Kurangnya dana dan sumber daya yang tersedia untuk melakukan proses edukasi dan sosialisasi yang mencukupi; dan lain sebagainya.

Pemahaman Pemerintah Daerah mengenai esensi dan tujuan *e-government* juga menjadi faktor yang mempengaruhi dalam penerapan *e-government*, hal ini karena penerapan e-government diharapkan dapat merubah sistem pemerintahan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan terorganisir. Sehingga penerapan *e-government* oleh pemerintah daerah tidak hanya karena ketakutan akan ketertinggalan oleh negara lain dalam bidang teknologi, sedangkan esensi dan tujuan utama *e-government* tidak dapat terwujud. Hal ini tentu akan merugikan pemerintah daerah sendiri karena akan terjadi pemborosan dana.

1.5 Kerangka Berpikir

Bagan 1.1
Kerangka Berpikir



Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

1.6 Defenisi Konseptual

Konsep operasional adalah penyusunan variabel-variabel penelitian yang dapat di ukur atau dioperasionalisasikan sesuai dengan kenyataan dilapangan. Untuk memudahkan penganalisaan dan menghilangkan kerancuan defenisi, maka operasional penelitian tentang pengelolaan aplikasi InPAS adalah :

1. Manajemen Layanan : Kegiatan pengelolaan pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau organisasi.
2. Informasi Pemerintah dan Masyarakat : Tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik Kabupaten Indragiri Hilir dengan sistem terpusat dan sentralistik.
3. Manajemen layanan InPAS : Merupakan kegiatan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik Kabupaten Indragiri Hilir dengan sistem terpusat dan sentralistik.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif . Menurut (Sugiyono, 2016), Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*. Sedangkan metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Sedangkan jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya. Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dalam mengeksplorasi dan klarifikasi fenomena terkait pengelolaan aplikasi Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPas) oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

1.7.2 Lokasi, Waktu dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PPID dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir karena sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh DiskominfoPS Kabupaten Indragiri Hilir yaitu pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik maka secara otomatis DiskominfoPS dituntut dalam menerapkan *e-government* dalam administrasi pemerintahannya maupun dalam pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu alasan penulis meneliti di PPID dan Dinas ini di karenakan ketertarikan penulis terhadap aplikasi InPas yang digunakan Dinas Kominfo, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tentang Keterbukaan Informasi Publik. Alasan menetapkan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebagai lokasi sekaligus objek penelitian sebagai berikut :

- a) Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis sebelumnya di kantor *Media Centre* PPID dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.
- b) Karena Belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan , 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan analisis data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung. Alasan memilih waktu penelitian tahun 2018 adalah

- a) Tahun tersebut merupakan tahun dimulainya pelaksanaan program Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS.
- b) Selain itu tahun tersebut tidak terlalu sulit untuk mendapatkan data-data, karena masih bisa didapatkan di lokasi penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian pada PPID dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. Ruang lingkup penelitian ini hanya berkaitan dengan Manajemen layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

1.7.3 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Untuk memperoleh informasi, keterangan dan data-data yang diperlukan, penulis mendapatkan data berdasarkan jenis dan sumber sebagai berikut :

- 1) Data Primer, Menurut (Bungin, 2013) adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu mengenai tanggapan informan tentang data-data maupun informasi yang diperlukan guna penelitian. Dalam penelitian kualitatif tidak dipermasalahkan jumlah informan. Prosedur pemilihan informan yang terpenting adalah menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu dengan syarat informasi sesuai dengan fokus penelitian.
 - a) Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (P4KSDKI), Project Leader InPAS, PPID Kabupaten Indragiri Hilir, Wartawan dan Masyarakat.
 - b) Proposal Proyek Perubahan “Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Aplikasi Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS) di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir.
- 2) Data sekunder, yaitu data tidak langsung diberikan kepada pengumpul data/ diperoleh dari pihak kedua seperti hasil dari penelitian orang lain, tulisan dan media cetak, berbagai buku, dokumentasi dan catatan pribadi yang memiliki hubungan dengan objek pengkaji. Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah :

- a) Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.
- b) Rencana Strategi (Renstra) Diskominfo PS dan Rencana Kerja (Renja) Diskominfo PS Tahun 2018.
- c) Data Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Data Informasi Publik pada Aplikasi Informasi Pemerintah dan masyarakat (InPAS) Kabupaten Indragiri Hilir.
- d) Dokumen Diskominfo Kabupaten Indragiri Hilir.
- e) Buku, Jurnal dan Perundang-undangan.

b. Sumber Data

Sumber data dilakukan dengan cara wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terkait di dalam Pengelolaan Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS) oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam melakukan sumber data maka harus ditentukan terlebih dahulu informan penelitian. Penelitian informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan prosedur purposif yang merupakan penentuan informan dengan pertimbangan tertentu atau teknik penentuan kriteria yang sudah jelas. Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi itu dapat diperoleh. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan yakni dengan menggunakan teknik prosedur purposif. Menurut (Bungin, 2013) Prosedur purposif adalah salah satu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.

Alasan memilih informan dalam penelitian ini adalah alasan posisional dan reputasi. Artinya informan dalam penelitian yang dimaksudkan penulis memiliki posisi dan reputasi yang bisa membantu untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dalam mengeksplorasi dan klasifikasi atas fenomena atau fakta tentang Manajemen Pengelolaan Informasi Pemerintah dan Masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1.4
Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Drs. H. M. Thaher, MM	Kepala Dinas Kominfops Kabupaten Indragiri Hilir	1 orang
2.	Trio Beni Putra, SE, MM	Kepala Bidang P4KSDKI DiskominfoPS Kabupaten Indragiri Hilir / PPID Utama	1 orang
3.	Nur Yuniati, SE	PPID Kabupaten Indragiri Hilir	1 orang
4.	Sukmawati, SE	PPID Kabupaten Indragiri Hilir	1 orang
5.	Bety Septika, SE	PPID Kabupaten Indragiri Hilir	1 orang
5.	Adhitya Prahara, SE	Wartawan	1 orang
6.	Suseswo Husodo	Masyarakat	1 orang
7.	Andriansyah	Masyarakat	1 orang
8.	Siti Aisyah	Masyarakat	1 orang
Jumlah			8 orang

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi atau data-data yang lengkap yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan ialah :

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada wawancara, khususnya wawancara mendalam. Menurut (Bungin, 2013) wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

pewawancara dan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial relatif lama. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada informan yang berada di Dinas KominfoPS dan PPID Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Dokumentasi

Menurut (Bungin, 2013) metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, seperti surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan, foto dan sebagainya.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisa kualitatif, Menurut (Bungin, 2013) Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan. Dimana penelitian ini melalui proses wawancara dan pengamatan di lapangan yang selanjutnya dianalisis sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan menghasilkan suatu kesimpulan.

Setelah data yang diperlukan diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif, kemudian disajikan dan dilengkapi dengan penjelasan yaitu menggambarkan dan memaparkan data yang berdasarkan kenyataan tentang Manajemen Layanan InPAS oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Deskripsi Umum Kabupaten Indragiri Hilir

2.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam melihat latarbelakang sejarah berdirinya kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu daerah otonom, dapat dilihat dari dua masa yaitu pada masa sebelum kemerdekaan dan periode sesudah Kemerdekaan Republik Indonesia.

a. Masa Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia

(1) Kerajaan keritang

Kerajaan keritang berdiri sejak awal abad ke 6 yang berlokasi diwilayah kecamatan keritang. Seni budaya pada kerajaan ini dipengaruhi oleh agama hindu, sebagaimana terlihat pada arsitektur bangunan yang ada pada yaitu istana yang dikenal dengan sebutan Puri Tujuh (Pintu Tujuh) atau kedaton gunung tujuh. Peninggalan kerajaan ini yang masih dapat dilihat hanya berupa puing.

(2) Kerajaan Kemuning

Kerajaan ini didirikan oleh Raja Singapura ke-V yang bergelar Raja sampu atau Raja Iskandarsyah Zulkarnain yang lebih dikenal dengan nama Prameswara. Pada tahun 1231 telah diangkat seorang raja muda yang kemudian bergelar Datuk Setiadiraja. Letak kerajaan ini berada diantara Desa Kemuning Tua Dan Desa Kemuning Muda. Bukti-bukti peninggalan kerajaan ini adalah ditemukannya selebar besluit dengan cap stempel kerajaan, bendera dan pedang kerajaan.

(3) Kerajaan Batin Enam Suku

Pada tahun 1260 daerah Indragiri Hilir bagian utara, yaitu di daerah Gaung Anak Serka, Batang Tuaka, Mandah dan Guntung dikuasai oleh raja-raja kecil bekas penguasa kerajaan Bintan, yang kemudian terjadi perpecahan hingga sebagian raja-raja tersebut menyebar ke daerah tersebut. Diantaranya terdapat Enam Batin (Kepala Suku) yang terkenal dengan sebutan Batin Nan Enam Suku, yakni:

- a. Suku Raja Asli Asal Di Daerah Gaung
- b. Suku Raja Rubiah Di Daerah Gaung
- c. Suku Nek Gwang Di Daerah Anak Serka
- d. Suku Raja Mafait Di Daerah Guntung
- e. Suku Datuk Kelambai Di Daerah Mandah
- f. Suku Datuk Miskin Di Daerah Batang Tuaka

(4) Kerajaan Indragiri

Kerajaan Indragiri diperkirakan berdiri tahun 1298 dengan raja pertama bergelar Raja Merlang I berkedudukan di Melaka. Demikian pula dengan pengganti raja merlang yaitu Raja Narasinga I dan Raja Merlang II, tetap berkedudukan di Malaka. Sedangkan untuk urusan sehari-hari dilaksanakan oleh datuk patih atau perdana menteri. Pada tahun 1473, Raja Narasinga II yang bergelar Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandarsyah Johan Zirullah Fil Alam (Sultan Indragiri IV), beliau menetap di ibukota kerajaan yang berlokasi di Pekan Tua saat ini.

Pada tahun 1815, dibawah kuasa Sultan Ibrahim ibukota kerajaan dipindahkan ke Rengat. Dalam masa pemerintahan Sultan Ibrahim ini

Belanda mulai ikut campur tangan terhadap kerajaan dengan mengangkat Sultan Muda yang berkedudukan di Peranap dengan batas wilayah ke Hilir sampai batas Japura.

Selanjutnya pada masa Sultan Isa, berdatanganlah orang-orang dari suku Banjar dan suku Bugis sebagai akibat kurang amannya daerah asal mereka. Khusus untuk suku Banjar perpindahannya diakibatkan dihapusnya Kerajaan Banjar oleh Gubernement pada tahun 1859 sehingga terjadi peperangan sampai pada tahun 1963.

(5) Masa Penjajahan Belanda

Dengan adanya Tractaat Van Vrindchaap (Perjanjian Perdamaian Dan Persahabatan) pada tanggal 27 September 1938 antara kerajaan Indragiri dan Belanda, maka kesultanan Indragiri Hilir menjadi *Zelfbestuur*. Berdasarkan ketentuan tersebut di wilayah Indragiri Hilir ditempatkan seorang *controlleur* yang membawahi enam daerah keamiran:

- a. Amir Tembilahan Di Tembilahan
- b. Amir Batang Tuaka Di Sungai Luar
- c. Amir Tempuling Di Sungai Salak
- d. Amir Mandah Dan Gaung Di Khairiah Mandah
- e. Amir Enok Di Enok
- f. Amir Reteh Di Kotabaru

Controlleur memegang wewenang semua jabatan bahkan juga menjadi hakim di pengadilan wilayah ini sehingga *Zelfbestuur* Kerajaan Indragiri terus dipersempit sampai dengan masuknya Jepang pada tahun 1942.

(6) Masa pendudukan Jepang

Balatentara Jepang memasuki Indragiri Hilir pada tanggal 31 Maret 1942 melalui Singapura terus ke Rengat. Tanggal 2 April 1942 Jepang menerima penyerahan syarat dari pihak Belanda yang waktu itu dibawah *controleur* K. Ehling. Sebelumnya tentara Jepang mendarat untuk pertama kalinya di daerah ini dikumandangkan lagu Indonesia Raya yang dipelopori oleh Ibnu Abbas.

Pada masa pendudukan Jepang ini Indragiri Hilir dikepalai oleh seorang Cun Cho yang berkedudukan di Tembilahan dengan membawahi 5 Ku Cho, yaitu:

- a. Ku Cho Tembilahan Dan Tempuling Di Tembilahan
- b. Ku Cho Sungai Luar Ku Cho Enok
- c. Ku Cho Reteh
- d. Ku Cho Mandah

Pemerintah Jepang di Indragiri Hilir sampai bulan Oktober 1945 selama lebih kurang 3,5 tahun.

b. Periode Setelah Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pada awal kemerdekaan RI, Indragiri (Hulu dan Hilir) masih merupakan satu Kabupaten. Kabupaten Indragiri ini terdiri atas 3 Kewedanaan, yaitu Kewedanaan Kuantan Singing dengan ibukotanya Taluk Kuantan, Kewedanaan Indragiri Hulu dengan ibukotanya Rengat dan Kewedanaan Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan. Kewedanaan Indragiri Hilir membawahi 6 wilayah yaitu:

1. Wilayah Tempuling/ Tembilahan

2. Wilayah Enok
3. Wilayah Gaung Anak Serka
4. Wilayah Mandah/ Kateman
5. Wilayah Kuala Indragiri
6. Wilayah Reteh

Perkembangan tata pemerintah selanjutnya, menjadikan Indragiri Hilir dipecah menjadi dua Kewedanaan masing-masing:

1. Kewedanaan Indragiri Hilir Utara Meliputi Kecamatan:
 - a. Kecamatan Tempuling
 - b. Kecamatan Tembilahan
 - c. Kecamatan Gaung Anak Serka
 - d. Kecamatan Mandah
 - e. Kecamatan Kateman
 - f. Kecamatan Kuala Indragiri Dengan Ibukotanya Tembilahan
 2. Kewedanaan Indragiri Hilir Selatan Meliputi Kecamatan:
 - a. Kecamatan Enok
 - b. Kecamatan Reteh dengan Ibukotanya Enok.
- 1) Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir

Merasa persyaratan administrasi terpenuhi maka masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II yang berdiri sendiri (otonom).Setelah melalui penelitian, baik oleh Gubernur maupun Departemen Dalam Negeri maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Provinsi Riau)

tanggal 27 April 1965 nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkanlah Undang-Undang nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia no 49, maka Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung tanggal 02 November 1965. Dan sejak itulah Kabupaten Tingkat II Indragiri Hilir berhak untuk memiliki Kepala Daerah sendiri, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati.

Berikut Bupati yang memimpin Kabupaten Indragiri Hilir sejak tahun 1965 hingga 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Nama Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 1965-2019

No	Nama Kepala Daerah	Periode Kepemimpinan
1	H. Mas Noer	1965-1968
2	Drs. H. Baharudin Yusuf	1968-1979
3	Drs. H. Bakir Alie	1979-1989
4	Ir. H. Usman Draman	1989-1994
5	Drs. H Azwin Jacob	1994-1999
6	H. M. Rusli Zainal	1999-2004
7	Drs. H. Badrum Saleh	PJ 2004
8	Drs. H. Djafri Kacak	PJ 2004
9	H. Ramli Walid	PJ 2008
10	H. Indra Muclis Adnan, SH, MH, MM	2003-2013
11	Drs. H. M. Wardan, MP	2013- Sekarang

Sumber: Arsip Indragiri Hilir

2.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi daerah tingkat II berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No. 49). Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Provinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan perairan

7.207 km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari dari berbagai etnis. Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki “ Negeri Seribu Parit” yang sekarang terkenal dengan julukan “ **Negeri Seribu Jembatan**” dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah daratan rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

0 36’ lintang Utara

1 07’ Lintang Selatan

104 10’ Bujur Timur

102 20’ Bujur Timur

Batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Batas Kabupaten Indragiri Hilir

No	Batas	Provinsi/ Kabupaten/ Kota
1	Sebelah Utara	Kabupaten Pelalawan
2	Sebelah Selatan	Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi
3	Sebelah Timur	Provinsi Kepulauan Riau
4	Sebelah Barat	Kabupaten Indragiri Hulu

Sumber: RPJM Kabupaten INHIL 2015-2019

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah yang memiliki banyak sungai dan parit diseluruh wilayahnya, sungai utama di daerah ini berasal dari danau singkarak (Sumatra barat) dan bermuara di Selat Berhala. Sebagian besar dari luas wilayah atau 93,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah daratan rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (*peat*), daerah hutan payau (*mangrove*) dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil

dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 meter dari permukaan laut.

Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan sungai reteh kecamatan keritang yang berbatasan dengan provinsi jambi. Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau.

Sungai terbesar di daerah ini adalah sungai Indragiri Hilir yang berhulu di pegunungan bukit barisan (Danau Singkarak), sungai Indragiri mempunyai tiga muara ke selat berhala, yaitu di Desa Sungai Belu, Desa Perigi Raja Dan Kuala Enok. Sedangkan sungai-sungai lainnya adalah : Sungai Guntung, Sungai Kateman, Sungai Danai, Sungai Gaung, Sungai Anak Serka, Sungai Batang Tuaka, Sungai Enok, sungai gangsal berhulu tiga yaitu Sungai Gangsal, Sungai Keritang, Sungai Reteh, Sungai Terap, Sungai Mandah, Sungai Igal, Sungai Pelanduk, Sungai Bantaian, Sungai Batang Tumu. Pulau-pulau yang terdapat di kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya telah didiami penduduk dan sebagian diusahakan penduduk untuk dijadikan kebun-kebun kelapa, persawahan pasang surut, kebun sagu, dan lain sebagainya.

Gugusan pulau tersebut meliputi : Pulau Kateman, Pulau Burung, Pulau Pisang, Pulau Bakong, Pulau Air Tawar, Pulau Pucung, Pulau Ruku, Pulau Mas, Pulau Nyiur dan pulau-pulau kecil lainnya.

2.2 Profil Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Indragiri Hilir

2.2.1 Sejarah Singkat Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Bagian humas Kabupaten Indragiri Hilir pada awalnya bergabung fungsi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, namun pada awal tahun 2017 bagian humas protokol Kabupaten Indragiri Hilir dipecah sehingga terpisah antara Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dan juga Bagian Humas Protokol Kabupaten Indragiri Hilir dengan berbagai tugas dan fungsi yang hampir sama, kedua elemen Pemerintah ini memiliki sinergitas sehingga tidak dapat dipisahkan begitu saja. Pada tahun 2017 Bagian Humas Protokol Kabupaten Indragiri Hilir berada dibawah pimpinan Sekretaris Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informasi berada dibawah pimpinan Kepala Dinas.

Sesuai dengan tugas dan fungsi serta memperhitungkan potensi, kendala, peluang dan tantangan yang mungkin timbul Bagian Humas protokol Kabupaten Indragiri Hilir dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik pada tahun anggaran 2017 menetapkan tujuan strategis dalam bentuk sasaran-sasaran strategis, yang mengacu pada rencana strategis Bagian Humas Protokol Kabupaten Indragiri Hilir dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Langkah ini diambil dalam rangka memberikan arah dan penetapan kebijakan untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien, sasaran-sasaran strategis tersebut diimplementasikan sebagai dari visi dan misidengan fokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan.

2.2.2 Kedudukan

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir merupakan perangkat daerah yang disertai wewenang tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian, dan Bidang Statistik. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika adalah urusan wajib yang dilaksanakan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir terletak di Jalan Akasia Nomor 02 Tembilihan Kota. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; Pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.3 Visi, Misi dan Tujuan

A. Visi dan Misi

Untuk menjalankan berbagai penyelenggaraan negara tentu suatu elemen pemerintah memiliki visi dan misi. Visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir ialah sebagai berikut: Visi yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Indragiri Hilir adalah **“Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Menuju Inhil Maju, Bermarwah dan Bermartabat”**.

Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik untuk pencapaian visi di atas, yaitu:

- 1) Meningkatkan sarana, dan prasarana, jaringan hingga ke pedesaan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 2) Meningkatkan kualitas sistem aplikasi, persandian dan statistik yang terintegrasi di semua lembaga pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan publik yang profesional berbasis TIK.

- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis TIK untuk memberikan pelayanan informasi multimedia kepada Publik yang terencana dan akuntable.

B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri hilir menetapkan inti pokok dan perencanaan strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengetahuan TIK bagi perangkat daerah dan masyarakat untuk memberikan pelayanan informasi dan komunikasi yang berkualitas, sehat dan mandiri
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana TIK untuk mendukung sistem keamanan, pelayanan, informasi, komunikasi dan data.
- 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik dalam upaya transparansi kegiatan pemerintah.

2.2.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Pokok dan Fungsi

Berdasarkan penjelasan diatas tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sesuai Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebagai berikut:

- 1) Tugas pokok

Dinas komunikasi dan informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas pemerintah dan pembangunan di bidang komunikasi dan

informasi yang diserahkan (Desentralisasi) dan diperbantukan kepada daerah di Kabupaten Indragiri Hilir dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

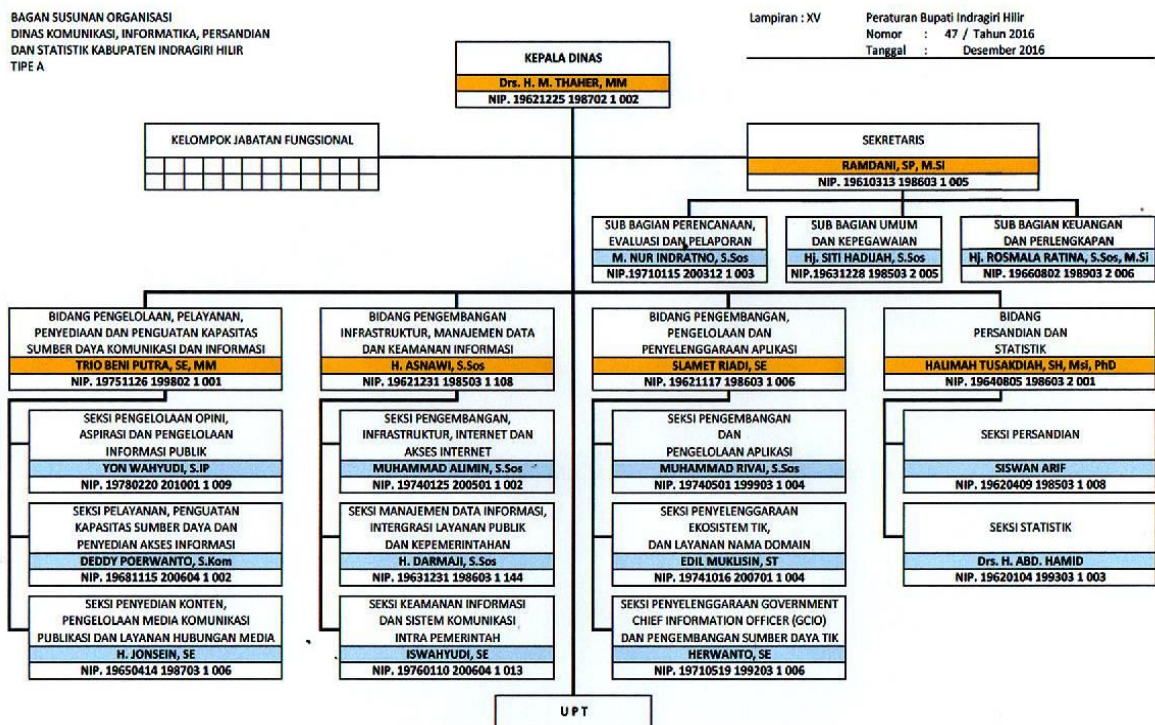
- a) Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik.
- b) Pelaksanaan tugas teknis urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik.
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik.
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik, dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mewujudkan mekanisme kerja yang harmonis serta hasil kerja yang optimal dalam konteks pelayanan pada masyarakat dan penyelenggaraan di bidang Komunikasi dan Informasi, Persandian dan Statistik maka penjabaran tugas pokok dan fungsi dituang kedalam uraian tugas untuk dipedomani oleh seluruh aparat Diskominfo ps baik struktural maupun fungsional.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi memiliki arti yang penting, karena dengan mengetahui struktur organisasi, maka dapat diperoleh gambaran mengenai bagian-bagian yang ada dalam organisasi pemerintahan tersebut dan sampai sejauh mana wewenang dan tanggung jawab bagian-bagian tersebut dapat melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, akan dapat diketahui siapa yang akan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas tersebut. Berikut struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan struktur dinas tersebut Kepala Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Kedudukan dalam Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama atau disebut PPID Utama.

2.2.5 Sumber Daya Dinas

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas KominfoPS Kabupaten Indragiri Hilir perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana (asset) dan sarana pendukung lainnya.

a) Sumber Daya Manusia

1. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 90 orang Pegawai. Dimana terdiri dari 30 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 60 tenaga kontrak/honorar.

2) Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PEGAWAI NEGERI SIPIL	24	6	30
2	TENAGA HONORER	40	20	60

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

3) Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten

Indragiri Hilir berdasarkan Pendidikan Formal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Pendidikan Formal

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	PENDIDIKAN								JUMLAH
		S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
1	PEGAWAI NEGERI SIPIIL (PNS)	1	5	14	2	-	8	-	-	30
2	TENAGA HONORER	-	1	33	3	-	21	-	2	60

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

4) Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten

Indragiri Hilir berdasarkan Pangkat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Pangkat

NO	KEPANGKATAN/GOLONGAN	JUMLAH PNS
1	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	-
2	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	1
3	PEMBINA Tk. I (IV/b)	1
4	PEMBINA (IV/a)	3
5	PENATA Tk. I (III/d)	8
6	PENATA (III/c)	7
7	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	1
8	PENATA MUDA (III/a)	1
9	PENGATUR Tk. I (II/d)	-
10	PENGATUR (II/c)	1
11	PENGATUR MUDA Tk. I (II/b)	3
12	PENGATUR MUDA (II/a)	4
13	JURU Tk. I (I/d)	-
14	JURU (I/c)	-
15	JURU MUDA Tk. I (I/b)	-
16	JURU MUDA (I/a)	-

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

2.3 Profil Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS)

Aplikasi ini sebagai sebuah konseptual program berbasis teknologi informatika dan praktis terhadap berbagai kebutuhan informasi, agar mudah diakses dan di pergunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Masyarakat dalam memberikan partisipasinya sebagai ruang komunikasi dan ruang informasi yang lebih harmonis, cepat dan dipercaya.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir melakukan pendaftaran Aplikasi Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS *di Play Store* pada 21 Juli 2018 sedangkan *launching* InPAS pada 11 Juli 2018.

Layanan yang terdapat pada Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS pada menu *Dashboard* adalah sebagai berikut: GGTV (Gemilang Televisi), SIAP POL PP INHIL (Sistem Informasi Terpadu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Inhil, Cloud Inhilkab, e-berTanjak, e-PAD, eMonev, ePerizinan, ePlanning, Gudang Data, Hotspot Area, Inhilkab Hosting, Inhilkab Main, JDIH, Laporan, LPSE, Media Center, PPID, SiPAMIL (ePengaduan), SIPKD, WebGIS Jalan & Jembatan dan WebGIS Sarana & Prasarana.

Sedangkan pada menu Kabar OPD berisi berita terkait Organisasi Perangkat Daerah. Menu Kabar Masyarakat berisi berita yang ditulis langsung oleh masyarakat. Tujuan Informasi Pemerintah dan Masyarakat yaitu tersedianya sistem pelayanan informasi dua arah (*input* dan *output*) yang memberdayakan seluruh organisasi perangkat daerah dan masyarakat, dalam memberikan informasi aktual sekaligus melawan *hoax*.

Keterkaitan antara Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, Statistik

Kabupaten Indragiri Hilir dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dari lembar kerja kegiatan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Lembar Kerja Kegiatan Pelayanan Informasi

No.	Data Kegiatan	Kegiatan
1	Judul	Proses Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
2	Jenis Kegiatan	Rutin/ Berkala
3	Penanggung jawab	Kepala Bidang Pejabat Pengelola Pelayanan dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Dinas Kominfo PS Kabupaten Indragiri Hilir
4	Produk / Output	Pelayanan Informasi PPID
5	Scope (Ruang Lingkup)	Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Sumber: Dinas KominfoPS Kabupaten Indragiri Hilir

Tabel 2.7
Pelaksana Kegiatan Lembar Kerja

No.	Pelaksana
1	PPID Utama
2	PPID Pembantu
3	Petugas Pelayanan
4	Operator

Sumber: Dinas KominfoPS Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan dalam proses pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir melalui sistem InPAS ini melibatkan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hilir serta setiap OPD yang berada di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir.

Data terkait anggaran Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS yaitu jenis asset, jumlah, nilai perolehan serta lokasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Anggaran Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS

No.	Jenis Asset	Jumlah	Kondisi	Nilai Perolehan	Lokasi
1	Bangunan Gedung Media Center	1	Baik	Rp 198,700,000	Tembilahan
2	Gedung Induk Studio SGTV sekarang menjadi Gemilang	1	Baik	Rp 24,480,000	Tembilahan
3	Gedung RSPD Kab. Inhil sekarang menjadi Studio Gemilang Radio	1	Baik	Rp 49,755,000	Tembilahan
4	Gedung Gemilang TV/GFM	1	Baik	Rp 193,682,000	Tembilahan
5	Concrete Tower	1	Baik	Rp 100,000,000	Tembilahan
6	Alat Pemancar UHF	1	Baik	Rp 300,400,000	Tembilahan

Sumber: Dinas Kominfo PS Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan tabel diatas, anggaran sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS memerlukan biaya yang tidak murah. Sarana dan prasarana pendukung ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menerapkan program InPAS demi mewujudkan Kabupaten Indragiri Hilir dengan pola *city smart*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Manajemen Layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS)

Pada bab ini Peneliti akan mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Manajemen Layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 dimana dalam hal ini menjelaskan tentang manajemen *electronic government* oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif dengan menggunakan kajian teori Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 (Ndraha, 2011: 160), antara lain :

- a) Perencanaan Pemerintahan;
- b) Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan;
- c) Penggunaan sumber-sumber pemerintahan;
- d) Kontrol pemerintahan;

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Dalam penelitian ini,

peneliti ingin mengetahui manajemen layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018.

Sebagaimana wawancara dengan Drs. H.M. Thaher, MM selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai berikut:

*“Urusan pemerintahan daerah bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik diberikan tugas kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal penyebarluasan informasi publik atau keterbukaan informasi publik salah satunya melalui sistem InPAS ini.”
(Wawancara 09 Desember 2019)*

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwasanya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir yang ditugaskan untuk melakukan urusan pemerintahan daerah bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik untuk keterbukaan informasi publik di Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan sistem teknologi informasi yang bersinergi yaitu sistem InPAS.

Dalam manajemen layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS), pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dan PPID melakukan fungsi manajemen *electronic government* dalam layanan InPAS yaitu:

3.1.1 Perencanaan Pemerintahan layanan InPAS

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir mensinergikan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik nasional melalui program-program Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dan merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir.

Pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir diselenggarakan berdasarkan arah dan kebijakan pembangunan daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan pola pemberdayaan masyarakat yang komprehensif yang mengedepankan prinsip dan nilai kearifan lokal.

Tabel 3.1
Meningkatkan Saran dan Prasarana Jaringan Hingga Kepedesaan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan sarana dan prasarana TIK untuk mendukung sistem keamanan pelayanan informasi, komunikasi dan data	Tersedianya sarana dan prasarana, informasi, komunikasi dan data dengan sistem keamanan yang berbasis TIK	Tersediannya sarana prasarana informasi komunikasi dan data dengan sistem yang berbasis TIK	1. Media Center 2. PPID 3. Sistem Informasi dan komunikasi yang terintegrasi antar OPD 4. Sistem persandian

Sumber: Renstra DiskominfoPS Kabupaten INHIL Tahun 2017-2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir salah satunya adalah Meningkatkan sarana, dan prasarana, jaringan hingga kepedesaan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi adapun indikator dalam misi tersebut adalah:

- a. Pusat Layanan Internet Masyarakat
- b. Media Center milik Pemda
- c. Sistem Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi antar OPD

Berikut disajikan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 3.2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Program	Indikator Kinerja Program atau Kegiatan	Data Capaian	Tahun 2018	
				Target	Rp.
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhnya Sarana Prasarana Kantor dan Pemeliharaan Peralatan Kerja	100%	100%	685,00

Sumber: Renstra DiskominfoPS Kabupaten INHIL Tahun 2017-2018

Program ini bertujuan terwujudnya pelayanan yang baik dan prima. Sasaran dari program ini adalah Meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran. Indikator kinerja dari program ini adalah cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur.

Awal mula dikeluarkannya sebuah perencanaan kebijakan dalam rangka meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik melalui program Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS) di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018, dilatarbelakangi oleh kebutuhan informasi publik yang relatif sulit diakses oleh masyarakat. Pemkab Inhil melalui DiskominfoPS sudah berupaya semaksimal mungkin agar pelaksanaan UU KIP berjalan baik. Kendati demikian, dukungan dari OPD terkesan masih setengah hati yang diindikasikan dengan sulitnya akses informasi oleh masyarakat. Kesulitan untuk mendapatkan data dan informasi dari OPD di lingkungan Pemkab Inhil, disebabkan oleh ketidaksamaan persepsi, kekhawatiran penyalahgunaan membuat sebagian besar OPD enggan memberikan data dan informasi kepada pihak - pihak yang sebenarnya sangat memerlukan. Oleh karena itu layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS) menjadi sebuah kebutuhan, ditambah dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini di jelaskan oleh Drs.H.M.

Thaher, MM selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

“InPAS ini merupakan sebuah program berbasis internet yang tengah dikembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir (Diskominfo PS) dengan tujuan untuk mempermudah akses informasi Kepemerintahan oleh masyarakat Indragiri Hilir pada umumnya. Disamping merupakan implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP.” (Wawancara 09 Januari 2020)

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwasanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan latar belakang lahirnya ide sistem aplikasi InPAS ini. InPAS merupakan sebuah program berbasis internet yang tengah dikembangkan DiskominfoPS Inhil dengan tujuan untuk mempermudah akses informasi pemerintahan oleh masyarakat Inhil secara luas. Melalui aplikasi ini, merupakan bagian pemanfaatan kemajuan di bidang teknologi informasi ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka optimalisasi keterbukaan informasi publik sesuai amanah UU Nomor 14 Tahun 2008. Diharapkan operator mampu menyampaikan berita-berita yang berkualitas melalui InPAS.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik telah berupaya semaksimal mungkin agar pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat dijalankan dengan baik khususnya di Indragiri Hilir. Namun demikian Organisasi Perangkat Daerah masih setengah hati dalam mendukung keterbukaan informasi publik karena belum ada satu persepsi dari semua kalangan dalam menjalankan keterbukaan informasi publik.

Selain itu kebijakan dalam rangka meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik melalui Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS) di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dilatar belakangi pula oleh kondisi wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, dengan rawa dengan tanah gambut (peat), dan daerah hutan payau (mangrove). Selain itu, wilayahnya juga terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil. Secara fisiografinya, wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau. Hal ini mengakibatkan sulitnya akses informasi apabila menggunakan transportasi darat. Maka diperlukan suatu terobosan untuk mempercepat akses informasi dan komunikasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipetakan kendala yang dihadapi dalam hal pelayanan keterbukaan informasi publik. Adapun deskripsi permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Belum tersediannya sistem keterbukaan informasi berbasis teknologi
2. Belum dikelola secara baik, cepat dan akurat informasi dari OPD dan Masyarakat
3. Belum memiliki informasi yang cepat dan akurat
4. Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap kewajiban memberi informasi
5. Belum tersedia tempat informasi atau berita aktual dari masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten

Indragiri Hilir membuat sebuah perencanaan program atau kebijakan sebagai dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Pada tahun 2017, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir mencanangkan sebuah program yang bernama “Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS” yang merupakan inovasi dari program keterbukaan informasi publik, adanya program ini membuat masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dapat mendapatkan data maupun informasi serta ikut berpartisipasi dengan melakukan pelaporan mengenai informasi atau berita di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, program Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS sudah diluncurkan pada tahun 2018. Program ini mengacu pada Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Manajemen Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini seperti yang dijelaskan informan Trio Beni Putra, SE, MM yang merupakan Project Leader InPAS sebagai berikut:

*“Proyek Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS direncanakan pada tahun 2018 lalu, lahirnya ide tersebut dilatarbelakangi oleh terbatasnya akses informasi di Kabupaten Indragiri Hilir oleh karena itu dibuatlah inovasi dari Teknologi Informasi dan Komunikasi ini.”
(Wawancara 06 Januari 2020)*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pada tahun 2018 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir membentuk Program Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS merupakan inovasi dari Teknolgi Informasi dan Komunikasi. Dasar aturan yang menjadi pedoman dalam mengimplementasikan program tersebut dirilis pada tahun 2018 melalui Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 20 Tahun 2018

Tentang Manajemen Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Agar kegiatan pengelolaan opini, aspirasi dan pengelolaan informasi publik, pelayanan, penguatan kapasitas sumber daya dan penyediaan akses informasi dan penyediaan konten, pengelolaan media komunikasi publik dan layanan hubungan media, perlu sebuah gagasan agar program yang ada, dapat di implementasikan secara efisien dan efektif dalam pelaksanaannya serta tercapainya tujuan dan sasaran secara optimal.

Gagasan yang akan dibuat, menuangkan sebuah konsep dengan konsep sistem pemberdayaan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat (Kelompok Informasi Masyarakat/ *Netizen Report*) yang penyelenggaraannya dibuat terintegrasi dan terkoordinasi secara mudah, fleksibel dan tetap terkontrol melalui sebuah aplikasi yang *support* dengan android (terdaftar di *Play Store*) sehingga akan tersedianya kebutuhan informasi pembangunan dan berita aktual dari masyarakat sebagai upaya mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.

Melalui kegiatan Optimalisasi Keterbukaan Informasi melalui Pengelolaan Aplikasi Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS bertujuan untuk tersedianya sistem pelayanan informasi dua arah (*input* dan *output*) yang memberdayakan seluruh organisasi perangkat daerah dan masyarakat, dalam memberikan informasi aktual seakligus melawan *hoax*.

Berdasarkan temuan di lapangan, peneliti menginterpretasikan bahwa sasaran dari program Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan informasi publik. Hal ini karena komitmen dan konsen penuh dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Kabupaten Indragiri Hilir akan pentingnya informasi bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga mampu melayani informasi dan dokumentasi dalam tingkat pelayanan yang baik menjadi nilai tambah untuk datangnya para wisatawan dan investasi.

Adapun maksud dan tujuan dari Program Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS yaitu :

1. Memberikan standar operasional manajemen pelayanan informasi dan dokumentasi publik bagi PPID Utama, PPID Pembantu PD di lingkungan Pemerintah Daerah dan Petugas Pengelola InPAS dalam memberikan pelayanan Informasi Publik;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Publik di setiap Badan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Tujuan utama dari penerapan Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS) ini adalah agar warga Indragiri Hilir tidak gagap teknologi (gaptek) di era serba digital. Hal ini sekaligus sebagai upaya dari Dinas Kominfops Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyiapkan segala sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Indragiri Hilir, karena menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tentu dengan perkembangan dan akses yang mudah akan memiliki dampak perkembangan yang sangat cepat baik dalam perorangan, bisnis, maupun bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut dijabarkan tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang penerapan Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS oleh Dinas

Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir:

a) Tujuan Jangka Pendek

1. Terbentuknya tim Pengelola Program Aplikasi InPAS
2. Tersedianya konsep dasar aplikasi
3. Tersedianya operator atau admin aplikasi InPAS setiap Organisasi Perangkat Daerah atau OPD
4. Terlaksananya sosialisasi Operator Organisasi Perangkat Daerah atau OPD
5. Terlaksananya pengujian dan penyempurnaan aplikasi InPAS
6. Terdaftar nya aplikasi InPAS di *Play Store*
7. Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
8. Tersedianya Media Tutorial
9. Terlaksananya sosialisasi ke publik tentang aplikasi InPAS
10. Terlaksananya *launching* aplikasi InPAS.

b) Tujuan Jangka Menengah

1. Tersusun nya Peraturan Bupati tentang aplikasi
2. Tersedianya Bank Data Informasi aplikasi
3. Tersedianya informasi pembangunan 2 berita setiap Organisasi Perangkat Daerah atau OPD per minggu
4. Tersusun nya Standar Operasional Prosedur atau SOP pengelolaan aplikasi
5. Terlaksananya lomba Organisasi Perangkat Daerah atau OPD dan Masyarakat Duta Informasi

6. Terlaksannya evaluasi akhir proses pengelolaan aplikasi InPAS
7. Tersedianya anggaran sebagai reward bagi pemberi informasi

c) Tujuan Jangka Panjang

Tersedianya informasi yang aktual, cepat dan dipercaya menuju *Good Governance* dengan konsep *city smart*.

Manfaat “Optimalisasi Keterbukaan Informasi melalui Aplikasi Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS” agar tersedianya sarana pelayanan informasi pembangunan dan berita masyarakat, dalam memberikan Informasi Pembangunan dan Berita aktual sekaligus upaya melawan *hoax*. Fokus area adalah pencapaian pemenuhan informasi pembangunan dan berita aktual dengan target 100% pada Tahun 2023 yaitu dengan Optimalisasi Keterbukaan Informasi melalui pengelolaan aplikasi InPAS di Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan ruang lingkup adalah pembuatan sistem aplikasi InPAS guna “Optimalisasi Keterbukaan Informasi melalui aplikasi Informasi Pemerintah dan Masyarakat dengan memberdayakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah atau OPD dan masyarakat, dalam memberikan Informasi Pembangunan dan Berita aktual.

Melalui sistem ini dapat menjadi salah satu upaya menciptakan *smart city* atau sebuah konsep kota cerdas atau pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien dalam memberikan informasi pembangunan dan berita aktual yang cepat dan tepat kepada masyarakat atau lembaga sebagai salah satu kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan (*good governance*).

Teknologi informasi harus dikelola oleh orang-orang yang kompeten di beragam bidang, seperti: jaringan, perangkat keras, aplikasi, database, data center,

pelatihan, proses bisnis dan lain sebagainya. Oleh karena itulah maka proses perekrutan, penempatan, pengembangan, penguatan, penilaian, pengawasan, hingga pelepasan (terminasi) para personal teknologi informasi di instansi pemerintahan harus dikelola secara profesional. Proses penentuan, pengelompokan, dan penaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Selain itu dalam fungsi ini juga berkaitan dengan penyuluhan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang yang berhubungan dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

Proyek InPAS ini tidak tersedia anggaran secara langsung yang tertuang dalam APBD Tahun 2018. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir akan menyingkronkan dan mensinergikan dengan kegiatan lain yang telah diterangkan pada APBD Tahun 2018. Berikut ditampilkan tabel berikut:

Tabel 3.3
Program dan Indikator Kinerja Informasi Pemerintah dan Masyarakat

No	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian	Tahun 2018	
				Target	Rp.
1	Program Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Infomasi	Cakupan pengembangan sistem <i>E-Government</i>	50 %	22 %	1,700,00

Sumber: Dinas KominfoPS Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan tabel diatas, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir akan menyingkronkan dan mensinergikan dengan kegiatan lain yang telah diterangkan pada APBD Tahun 2018. Program yang sesuai dengan InPAS adalah Program Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Infomasi. Maka, sudah terealisasi sebesar 22 % atau Rp 1,700,00.

Dengan berbekal kemampuan mengapresiasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir bertekad memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari sistem dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir atau lebih dikenal *e-government*. Dalam penyelenggaraan *e-government* Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir telah membangun infrastruktur jaringan komunikasi di seluruh OPD dan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk Implementasi *e-government* sistem yang sudah di bangun dan dalam tahap penyempurnaan antara lain Program-program Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir akan disejalankan dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan visi spirit baru Indragiri Hilir yang lebih maju, Bermarwah dan bermartabat, adapun upaya yang menjadi prioritas saat ini, penataan tower telekomuniasi dengan revisi perda, pelayanan informasi publik dengan sistem *e-government*, membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kecamatan dan Desa serta meningkatkan kemitraan dengan media massa di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai akses informasi bagi masyarakat.

Perencanaan program Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS terkait perbandingan target dan realisasi program dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi dan Target Program InPAS

No.	Program	Target Awal	Realisasi
1	Pengembangan program InPAS	50 %	22 %

Sumber: Dinas Kominfo PS Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan tabel diatas, program pengembangan layanan berbasis teknologi informasi di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu program InPAS dari target awal 50 % namun yang terealisasi hanya 22 %. Penulis berpendapat bahwa realisasi program Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS masih jauh dari target yang direncanakan diawal.

3.1.2 Pengorganisasian Sumber-sumber Pemerintahan dalam layanan InPAS

Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi (KI) Riau 2019 sebagai Badan Publik Cukup Informatif. Penghargaan tersebut diberikan setelah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dinilai cukup sebagai badan publik dengan kategori cukup Informatif oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau. Beberapa kriteria sebagai peraih penghargaan telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir seperti tata kelola informasi publik, PPID Utama, sistem layanan serta SDM dan infrastruktur yang memadai. Namun demikian, kekurangan berada pada PPID Pembantu yang berada di instansi atau OPD, perlu meningkatkan lagi kualitas dan kuantitasnya sehingga dapat patuh dalam pengisian informasi publik.

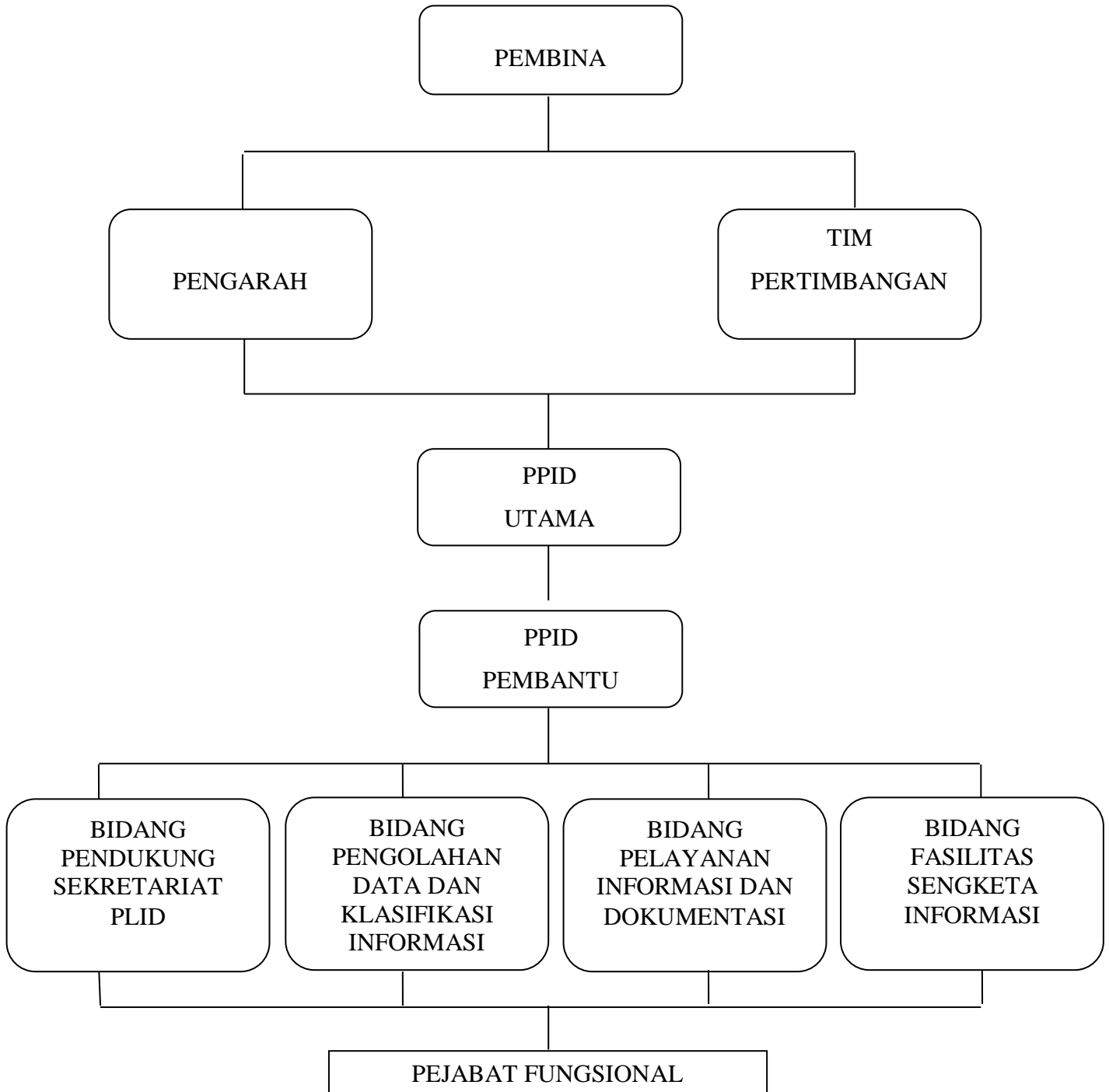
Berdasarkan kondisi Kabupaten Indragiri Hilir yang mendapatkan penghargaan layanan informasi tersebut, penulis coba mengaitkat dengan

kelemahan pengorganisasian sumber-sumber pada layanan InPAS tersebut. Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan penaturan berbagai macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Tim dalam program Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS, diisi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki tupoksi secara langsung berhubungan dengan Keterbukaan Informasi Publik yakni Kepala Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir atau PPID Utama. Sebagaimana sesuai dengan hasil wawancara bersama Nur Yuniati SE, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

“Struktur pejabat yang mengelola Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS ini dapat dilihat di Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 634/IX/HK-2017 tentang Penetapan Struktur dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Disurat keputusan tersebut dijelaskan siapa dan tugasnya apa dalam mengelola informasi dan dokumentasi di Kabupaten Indragiri Hilir.” (Wawancara 06 Januari 2020)

Dari pernyataan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 634/IX/HK-2017 tentang Penetapan Struktur dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Tanggal 28 September 2017 menetapkan Struktur dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada bagan berikut:

Bagan 3.1
Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber: Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor:Kpts.634/IX/HK-2017

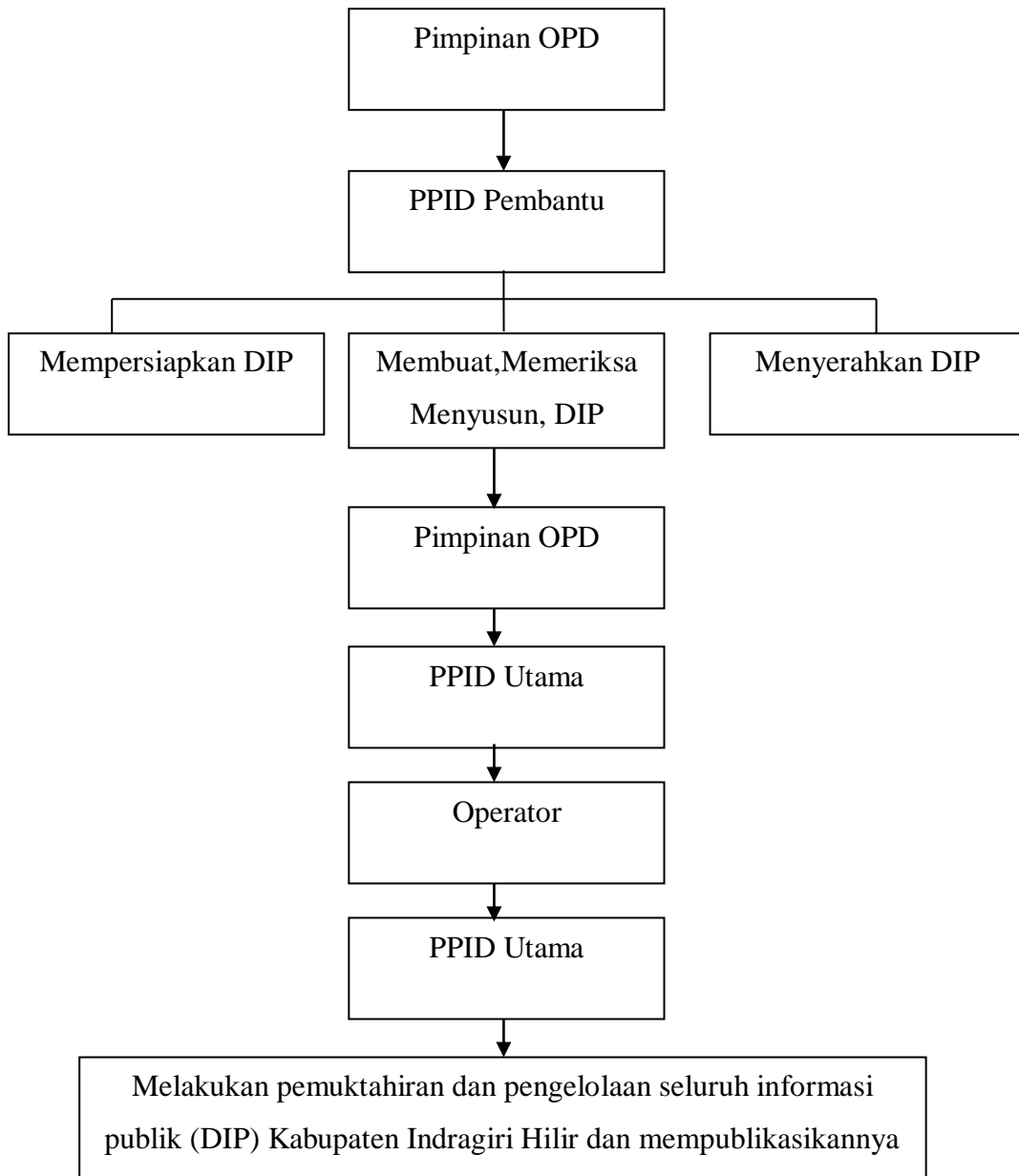
Struktur tim program Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS yang telah disusun oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, diisi oleh struktur inti teknis pelaksana program Informasi Pemerintah dan masyarakat atau InPAS yaitu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebagai pimpinan SKPD. Kemudian selaku koordinator program Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS, diisi oleh Kepala Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Kabupaten Indragiri Hilir.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama diisi oleh Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, terdiri dari:

1. Seksi Pengelolaan Opini, Aspirasi dan Pengelolaan Informasi Publik.
2. Seksi Pelayanan, Penguatan Kapasitas Sumber Daya dan Penyediaan Akses Informasi.
3. Seksi Penyediaan Konten, Pengelolaan Media Komunikasi Publikasi dan Layanan Hubungan Media.

Berikut ditampilkan bagan pelaksana program InPAS dalam penyusunan data informasi publik:

Bagan 3
Pelaksana Program InPAS dalam Penyusunan Data Informasi Publik



Sumber: SOP Penyusunan Data Informasi Publik pada InPAS

Berdasarkan hasil data yang peneliti dapatkan bahwa dalam tim Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS, kuantitas jumlah pegawainya masih kurang, sebagaimana dijelaskan Bapak Trio Beni Putra, SE, MM sebagai berikut:

“Sumber daya dinas yang mengelola InPAS atau Informasi Pemerintah dan Masyarakat masih belum optimal, karena selain jumlah pegawai, kualitas operator yang memiliki keahlian atau paham tentang ini masih kurang. selain itu anggaran untuk program InPAS ini berasal dari APBD Kabupaten Inhil serta bantuan berupa masukan-masukan dari Pemprov Riau,” (Wawancara 06 Januari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, sumberdaya yang menjadi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS di Kabupaten Indragiri Hilir, peneliti memperoleh informasi mengenai anggaran yang berasal dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. Anggaran berasal dari keuangan daerah sendiri seperti APBD Kabupaten Indragiri Hilir dan Bantuan Provinsi Riau berupa masukan-masukan untuk melaksanakan program Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS di Tahun 2018.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi sekarang telah berdampak pada perubahan mendasar dengan membawa bangsa ini menuju paradigma baru memasuki era teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Teknologi Informasi dan Komunikasi diarahkan pada ketersediaan jaringan informasi dan data yang menghubungkan instansi pemerintah dalam rangka optimalisasi pelayanan umum. Dimana pelayanan umum yang cepat, profesional, transparan dan lebih mudah merupakan harapan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

Dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang kurang memadai menghambat Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten

Indragiri Hilir dalam mewujudkan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir memiliki keterbatasan dari segi jumlah dalam sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas. Upaya yang menjadi prioritas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir saat ini, penataan tower telekomunikasi dengan revisi perda, pelayanan informasi publik dengan sistem *e-government*, membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kecamatan dan Desa serta meningkatkan kemitraan dengan media massa di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai akses informasi bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Drs. H. M. Thaher, MM sebagai kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

“Kendala dilapangan tetap ada, tapi kami (Diskominfo PS) akan terus berusaha mengatasi kendala yang ada, mulai dari perbaikan infrastruktur telekomunikasi, tower, jaringan, layanan informasi, GGTV yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir untuk menjangkau sampai pelosok Kabupaten Indragiri Hilir.” (Wawancara 09 Januari 2020)

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS akan terus digesa walaupun tidak mudah, namun Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir akan terus berusaha mengatasi berbagai kekurangan dan permasalahan pada pelaksanaannya di lapangan. Selain itu untuk jangkauan penyediaan jasa layanan informasi melalui berbagai media (cetak, online dan elektronik) yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, akan terus digesa, saat ini untuk *website* Inhilkab.go.id sudah tidak ada masalah walaupun sempat terjadi masalah, dan

untuk Radio Gemilang Fm (Gfm) terus mengudara dan akan kita upayakan di tingkatkan luas jangkauannya hingga ke pelosok negeri di Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Gemilang TV (GTV) saat ini dalam upaya menjalin kerjasama dengan pihak Indosat agar tayangan dapat berbasis satelit, agar dapat menjangkau keseluruhan wilayah terpencil di daerah-daerah, khususnya di perbatasan. Dengan berbagai cara yang kita upayakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara luas, setiap saat agar dapat menjadikan sarana peningkatan ekonomi, sosial, politik, budaya, ideologi dan sebagainya.

Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS merupakan sistem berbasis android sebagai suatu upaya untuk menciptakan keterbukaan informasi publik serta pelayanan berbasis digital di Kabupaten Indragiri Hilir. Kelebihan Informasi Pemerintah dan Masyarakat terletak pada kemudahan dalam mengembangkan aplikasi tersebut untuk beragam keperluan seperti informasi Organisasi Perangkat Daerah dan Kabar Masyarakat serta GGTV (Gemilang Televisi), SIAP POL PP INHIL (Sistem Informasi Terpadu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Inhil, Cloud Inhilkab, e-berTanjak, e-PAD, eMonev, ePerizinan, ePlanning, Gudang Data, Hotspot Area, Inhilkab Hosting, Inhilkab Main, JDIH, Laporan, LPSE, Media Center, PPID, SiPAMIL (ePengaduan), SIPKD, WebGIS Jalan & Jembatan dan WebGIS Sarana & Prasarana.

Dalam lingkup era globalisasi semua hal menjadi mudah dan cepat, pada Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS telah diberikan begitu banyak pilihan sesuai kebutuhan kita, dari informasi bahkan pelayanan publik. Dalam kemudahannya seperti yang diutarakan selaku Kepala Bidang, masyarakat hanya

perlu mencari informasi yang diinginkan di aplikasi Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS. Jika dahulu kita harus membaca koran, mendengarkan radio dan menonton tv, sekarang dengan internet sebagai pendukung *e-government* kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah, akurat, terpercaya, bisa dibaca kapan saja, tersedia selama 24 jam, dan bisa kita baca dimana saja. Demi mewujudkan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai *smart city* yang membutuhkan yang namanya *smart government*, *smart people*, *smart* edukasi dan lainnya untuk mendukung *smart city* ini. Sesuai dengan karakteristik media baru, yang tersedia kapan saja, dimana saja pada perangkat digital. Aplikasi Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS dinilai masyarakat lebih efisien dalam mencari informasi dan cepat.

Keragaman pilihan informasi berbagai pilihan informasi untuk melayani macam kebutuhan masyarakat, dimana tersedianya banyak informasi yang disediakan sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk keragaman informasi, dalam tampilan awal aplikasi Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS, telah menunjukkan berbagai pilihan daftar informasi yang dibutuhkan masyarakat. Jika ingin menonton tv lokal bisa dicek di *dashboard* GGTV atau Gemilang Televisi, jika ingin melihat berita atau kegiatan seputar Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa cek di Kabar OPD selanjutnya jika ada informasi dari masyarakat terkini, ada dashboard khusus untuk masyarakat yang ini mengirim atau menulis berita di Kabar Masyarakat. Ketersediannya informasi juga untuk keterbukaan dan sebagai bentuk membantu masyarakat dalam hal mencari informasi yang diperlukan masyarakat. Jadi dalam hal ini masyarakat

tidak perlu bingung lagi untuk mencari informasi yang diinginkan karena telah tersedia keragaman informasi sesuai kebutuhan masyarakat.

3.1.3 Penggunaan Sumber-sumber Pemerintahan dalam layanan InPAS

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Trio Beni Putra, SE, MM selaku koordinator dan Kepala Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Kabupaten Indragiri Hilir dalam Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS, menjelaskan bahwa bentuk koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS bermula dari Pimpinan Perangkat Daerah membuat rancangan Daftar Informasi Publik. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Pelaksana Kegiatan Informasi Pemerintah dan Masyarakat

No.	Uraian Kerja atau Prosedur
1	Pimpinan Perangkat Daerah membuat rancangan Daftar Informasi Publik
2	PPID Pembantu (Sekretaris) Perangkat Daerah mempersiapkan rancangan Daftar Informasi Publik beserta informasi/ data/ dokumen.
3	PPID Pembantu (Sekretaris) membuat dan mengumpulkan Daftar Informasi Publik
4	PPID Pembantu (Sekretaris) memeriksa rancangan Daftar Informasi Publik
5	PPID Pembantu (Sekretaris) menyusun rancangan Daftar Informasi Publik
6	PPID Pembantu (Sekretaris) menyerahkan rancangan Daftar Informasi Publik ke Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
7	Pimpinan Perangkat Daerah menyetujui Daftar Informasi Publik
8	PPID Utama menyetujui Daftar Informasi Publik
9	Operator menginput Daftar Informasi Publik disertai salinan dokumen (<i>softcopy</i>) atau informasi (rilis kegiatan dan foto) kedalam aplikasi InPAS
10	PPID Utama melakukan pemuktakhiran dan pengelolaan seluruh Daftar Informasi Publik (DIP) Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengikuti prosedur diatas, dan mempublikasikannya.

Sumber: Dinas Kominfo PS Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan tabel diatas, pelaksana kegiatan Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS dilaksanakan oleh PPID Utama, PPID Pembantu, Petugas

Pelayanan dan Operator. Judul kegiatan pada tabel diatas adalah Penyusunan Data Informasi Publik. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin atau berkala. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Kepala Bidang Pejabat Pengelola Pelayanan dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi dengan ruang lingkup (*scope*) kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik telah menetapkan Standar Operasional Prosedur atau SOP Penyusunan Data Informasi Publik pada aplikasi Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Standar Operasional Penyusunan Data Informasi Publik

No.	Item Kegiatan	Penanggung Jawab	Waktu
1	Membuat rancangan DIP	Pimpinan OPD	1 jam kerja
2	Mempersiapkan rancangan DIP beserta informasi/ data/ dokumennya	PPID Pembantu (Sekretaris OPD)	1 jam kerja
3	Membuat dan mengumpulkan rancangan DIP	PPID Pembantu (Sekretaris OPD)	1 jam kerja
4	Memeriksa rancangan DIP	PPID Pembantu (Sekretaris OPD)	1 jam kerja
5	Menyusun rancangan DIP	PPID Pembantu (Sekretaris OPD)	1 jam kerja
6	Menyerahkan rancangan DIP ke Pimpinan OPD	PPID Pembantu (Sekretaris OPD)	1 jam kerja
7	Kepala SKPD menyetujui DIP	Pimpinan OPD	1 jam kerja
8	Mengumpulkan seluruh DIP	PPID Utama (Tim Pengelola)	1 jam kerja
9	Menginput DIP disertai salinan dokumen (<i>softcopy</i>) atau informasi (rilis kegiatan dan foto) ke dalam aplikasi InPAS	Operator	1 jam kerja
10	Melakukan pemutakhiran dan pengelolaan seluruh DIP Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengikuti prosedur diatas dan mempublikasikannya.	PPID Utama (Tim Pengelola)	1 jam kerja

Sumber: Dinas Kominfo PS Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan tabel diatas, struktur yang terlibat dalam penyusunan Data Informasi Publik (DIP) adalah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), PPID Utama yaitu Tim Pengelola, PPID Pembantu yaitu Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Operator. Berikut dijabarkan item kegiatan penyusunan Data Informasi Publik:

d. Pimpinan OPD

Bertugas membuat Rancangan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Kelapa SKPD menyetujui Daftar Informasi Publik (DIP).

e. PPID Utama (Tim Pengelola)

Bertugas mengumpulkan seluruh Daftar Informasi Publik (DIP) dan melakukan pemuktahiran dan pengelolaan seluruh Daftar Informasi Publik (DIP) Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengikuti prosedur dan mempublikasikannya.

f. PPID Pembantu (Sekretaris OPD)

Bertugas menyiapkan rancangan Daftar Informasi Publik beserta informasi/ data/ dokumen, membuat dan mengumpulkan rancangan Daftar Informasi Publik (DIP), memeriksa rancangan Daftar Informasi Publik (DIP) menyusun dan menyerahkan rancangan Daftar Informasi Publik (DIP) ke Pimpinan OPD.

g. Operator

Bertugas menginput Daftar Informasi Publik disertai salinan dokumen (*softcopy*) atau informasi (rilis kegiatan dan foto) kedalam aplikasi InPAS.

Selain Standar Operasional Prosedur atau SOP Penyusunan Data Informasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten

Indragiri Hilir juga menetapkan Standar Operasional Prosedur atau SOP Proses Pengkoreksian Informasi dan Dokumentasi pada Aplikasi Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS Kabupaten Indragiri Hilir. Standar Operasional Prosedur Proses Pengkoreksian Informasi dan Dokumentasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Proses Pengkoreksian Informasi dan Dokumentasi Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS)

No.	Item Kegiatan	Pelaksana	Waktu
1	Melakukan pengkoreksian atas informasi yang masuk	Tim Pengelola	Setiap saat
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen masuk yang dianggap bersifat rahasia berdasarkan Undang-undang	PPID Utama	Pada hari dan jam kerja
3	Memposting informasi yang layak dan selesai di koreksi	Tim Pengelola	Setiap saat
4	Menyampaikan kepada PPID Pembantu atas Informasi yang dirahasiakan menurut peraturan perundang-undangan	PPID Pembantu	Setiap saat
5	Informasi yang tidak layak berdasarkan peraturan perundang-undangan diarsipkan kedalam server dan tidak dipublikasikan	Server	Setiap saat

Sumber: Dinas Kominfo PS Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan tabel Proses Pengkoreksian Informasi dan Dokumentasi, dapat dilihat bahwa kegiatan pengkoreksian ini dilakukan antara lain:

a. Tim Pengelola

Bertugas melakukan pengkoreksian atas informasi yang masuk dan memposting informasi yang layak dan selesai dikoreksi.

b. PPID Utama

Memberikan pertimbangan atas informasi atau dokumen masuk yang dianggap bersifat rahasia berdasarkan Undang-undang.

c. PPID Pembantu

Bertugas menyampaikan kepada PPID Pembantu atas informasi yang dirahasiakan menurut peraturan perundang-undangan.

d. Server

Informasi yang tidak layak berdasarkan peraturan perundang-undangan diarsipkan kedalam server dan tidak dipublikasikan.

Walaupun Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sudah melakukan koordinasi dengan masyarakat, tetapi menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hilir Beti Septika, SE sebagai berikut:

“Dinas Kominfo PS sudah melakukan koordinas, tetapi masih banyak masyarakat yang salah persepsi, ada beberapa berita yang tak boleh di publikasikan sesuai peraturan perundang-undangan, tapi kami tetap mencoba menjelaskan ke masyarakat, agar mereka paham tentang makna Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut.” (Wawancara 06 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat dalam hal ini masih banyak salah persepsi tentang informasi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Informasi dan dokumentasi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir tidak seluruhnya dipublikasikan, ada beberapa data atau informasi atau dokumen yang bersifat rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam hasil pemaparan diatas bahwa proses koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sudah dijalankan sesuai dengan prosedur kegiatan mulai dari pelaporan oleh masyarakat kemudian penyusunan data informasi publik serta proses pengkoreksian informasi dan dokumentasi pada Informasi Pemerintah dan

Masyarakat atau InPAS. Akan tetapi memang dalam pelaksanaannya selalu ada kekurangan, seperti masalah kesalahpahaman masyarakat mengenai informasi yang bersifat rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan serta mengenai publikasi di akun Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS.

Berdasarkan wawancara bersama Adhitya Prahara selaku anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Indragiri Hilir yang juga Pemimpin Redaksi Medialokal.co sebagai berikut:

“Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Indragiri Hilir cukup baik, hanya saja berita atau informasi yang terdapat di InPAS atau Informasi Pemerintah dan Masyarakat kurang menarik, karna saat ini masyarakat suka atau butuh informasi yang unik dan viral.” (Wawancara 07 Desember 2019)

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS sudah cukup baik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan. Informasi pada sistem InPAS dikemas kurang menarik, saat ini masyarakat menyukai informasi yang terkini, *update* dan terpercaya. Saat ini informasi atau berita yang tertuang dalam sistem InPAS masih seputar informasi pemerintah daerah secara umum, sedangkan kolom berita Kabar Masyarakat masih kurang peminat, hal ini cukup mempengaruhi minat masyarakat pada sistem Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS.

Berdasarkan wawancara bersama Kanda Andriansyah yang merupakan masyarakat Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai berikut:

“Sistem Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS ini merupakan sistem berbasis android yang keren, hanya saja informasi yang disediakan pada sistem ini terbatas dan kurang di update, ketika saya mencari berita atau data, justru tidak tersedia pada sistem ini, kurang lebih begitu.” (Wawancara 08 Desember 2019)

Hasil penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan InPAS sudah cukup baik, masyarakat juga dapat menggunakan sistem ini apalagi sistem ini berbasis android jadi masyarakat dapat mengunduh di ponsel mereka dan menggunakannya. Hanya saja, fitur yang disediakan belum dapat dipahami secara cepat, serta informasi yang disediakan kurang *update*.

3.1.4 Kontrol Pemerintahan dalam layanan InPAS

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS dilakukan oleh Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir selaku pimpinan SKPD.

Seperti yang diutarakan oleh Bapak Trio Beni Putra, SE, MM. Selaku Kepala Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi sebagai berikut:

*“Pengawasan dalam Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS diawasi oleh seluruh stakeholders, karena SKPD terkait telah melakukan transparansi informasi melalui sistem InPAS berbasis android ini.”
(Wawancara 06 Desember 2019)*

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. Diawasi oleh seluruh *stakeholder* terkait, karena telah dilakukan transparansi oleh dinas terkait melalui sistem android.

Prosedur pengawasan dalam Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS ini dilakukan secara informal. Pengawasan dilakukan secara informal melalui *dashboard* Kabar Masyarakat, karena pusat koordinasi seluruh tim

Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS berada di sistem InPAS ini sehingga proses pengawasan dapat dijalankan dengan baik.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Trio Beni Putra, SE, MM. Selaku Kepala Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi sebagai berikut:

“Selain itu, pengawasan yang kami lakukan bersifat informal. Jadi, beberapa kegiatan ada yang sesuai perencanaan awal tapi ada juga yang tak sesuai, ini kami terus melakukan koreksi ataupun perbaikan-perbaikan pada InPAS ini.” (Wawancara 06 Desember 2019)

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pelaksanaan Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS Tahun 2018 sebagai upaya Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Indragiri Hilir, ada kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Namun, ada pula kegiatan-kegiatan yang belum sesuai dengan perencanaan awal, sehingga diperlukan tindakan perbaikan atau korektif dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

Mengenai proses standar keberhasilan dalam suatu pelaksanaan kegiatan, ketika peneliti menanyakan standar keberhasilan kegiatan manajemen layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS kepada Bapak Trio Beni Putra, SE, MM selaku Kepala Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, beliau mengatakan:

“Program atau kegiatan dapat dikatakan berhasil apabila dilaksanakan dengan cepat dan tepat, baik dari segi publikasi atau pengelolaannya. Kita

semua sudah berusaha, tapi saat ini memang belum maksimal dan perlu perbaikan-perbaikan kedepannya.” (Wawancara 06 Januari 2020)

Hasil penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kegiatan ini dianggap berhasil jika informasi/ data/ dan dokumen dapat dilaksanakan atau dipublikasi dengan cepat dan tepat, tercapainya Keterbukaan Informasi Publik warga Kabupaten Indragiri Hilir sebagai pengguna layanan ini. Hanya saja beberapa kendala membuat program atau kegiatan ini belum maksimal dan perlu perbaikan untuk mewujudkan tujuan *e-government* di Kabupaten Indragiri Hilir.

3.2 Faktor penentu Tingkat Kesiapan *E-Government* pada layanan InPAS

Menurut (Indrajid, *e-Government in Action*, 2005), ada sejumlah faktor penentu yang patut menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat kesiapan sebuah daerah untuk menerapkan *e-government* yaitu:

- a) Infrastruktur Telekomunikasi
- b) Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI oleh Pemerintah
- c) Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintah
- d) Ketersediaan Dana dan Anggaran
- e) Perangkat Hukum
- f) Perubahan Paradigma.

Berikut dijelaskan pengaruh indikator penentu tingkat kesiapan *E-Government* pada Layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018.

3.2.1 Infrastruktur Telekomunikasi

Teknologi Informasi yang digunakan dalam pengembangan *e-Government* bervariasi, dari yang paling murah hingga yang paling mahal, sedangkan dana yang tersedia terbatas, terbatas pada hasil yang akan dicapai sesuai yang telah

direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain teknologi informasi yang akan digunakan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan, memang semakin besar anggaran maka semakin canggih teknologinya, disini pemerintah harus pintar dalam mempertimbangkan perbandingan *price versus performance*, agar pengeluarannya tidak sia-sia apabila ternyata manfaat yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan *e-Government* (seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus, disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta, dan lain sebagainya). Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *e-Government*.

Terdapat beberapa permasalahan kompleks Aspek Infrastruktur yang kerap kali muncul dalam penerapan *e-government system* untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.

- 1) Adanya ketimpangan digital yang mengakibatkan belum meratanya ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, mengingat secara geografis wilayah Indonesia tersebar di berbagai kepulauan.
- 2) Ketersediaan infrastruktur untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi masih terpusat di kota-kota besar. Tenaga ahli di daerah terpencil pun masih sangat jarang, jika tidak mau dikatakan tidak ada.

- 3) Sistem layanan publik di Indonesia tidak memiliki standar yang baku. Hal ini menghambat pengintegrasian data kependudukan dan dokumen warga negara lainnya secara nasional

Berikut tabel infrastruktur yang berkaitan dengan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam penyusunan data informasi publik pada aplikasi Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS Kabupaten Indragiri Hilir:

Tabel 3.8
Peralatan atau Perlengkapan Penyusunan Data Informasi Publik (DIP)
InPAS

No.	Peralatan atau Perlengkapan Penyusunan DIP
1	Komputer
2	ATK
3	<i>Form Press Release</i>
4	<i>Handphone android</i>

Sumber: SOP Dinas Kominfo PS Kabupaten INHIL

Berdasarkan data tabel diatas, dapat dilihat peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam penyusunan Daftar Informasi Publik pada aplikasi InPAS jika tidak terpenuhi maka akan berdampak pada terlambatnya penyusunan data informasi publik sehingga tidak *updatenya* semua informasi publik.

Arahan dan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana perkantoran dalam penunjang sistem pelayanan yang baik dan prima. Kegiatan yang akan dilaksanakan mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang proses administrasi perkantoran, indikator dari kegiatan ini adalah terpenuhnya kebutuhan sarana dan prasarana kantor.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Drs. H. M. Thaher, MM selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

“Saat ini infrastruktur telekomunikasi sudah menjadi hal yang mutlak dan seharusnya bukan dianggap sebagai beban, namun sebagai modal. Apalagi di era Industri 4.0 semua menggunakan internet. Industri 4.0 perlu disikapi sebagai tantangan dan peluang dengan baik oleh pemangku kepentingan.” (Wawancara 09 Desember 2019)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Infrastruktur Telekomunikasi di era Industri 4.0 menggunakan teknologi terkini. Tantangan dan peluang harus ditangani dengan baik oleh semua pemangku kepentingan, agar bisa mendapatkan keuntungan dari fenomena ini. Hal lain yang tak kalah penting adalah terkait pemilihan teknologi agar bisa benar-benar bermanfaat. Jika salah dalam pemilihan, maka teknologi akan mahal dan manfaatnya tidak sepenuhnya bisadiperoleh masyarakat.

Aplikasi yang ada membutuhkan kekhususan lokal dan hal ini merupakan hal yang harus dikejar. Saat ini sudah bukan masanya *network*, namun ke arah aplikasi. Kedepan pasar aplikasi ke depan akan lebih besar jika dibandingkan dengan *network*. Berkaitan dengan regulasi, pemerintah berusaha menjadi regulator yang tidak menghambat. Teknologi yang hadir tidak bisa dibendung, karena manfaatnya nyata untuk masyarakat. Pemerintah juga berusaha menjadi fasilitator atau bahkan akselerator jika memungkinkan. Pemerintah perlu melindungi inovasi yang hadir, karena kebanyakan regulasi tidak memungkinkan memayungi hadirnya teknologi dan inovasi yang berguna untuk masyarakat.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir meluncurkan sistem Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS)

yang merupakan inovasi dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sistem InPAS merupakan aplikasi berbasis android dan hadir di tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi seputar Kabupaten Indragiri Hilir. Aplikasi InPAS yang juga merupakan terobosan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir ini diadopsi dengan pola *city smart*. Aplikasi InPAS ini dapat diunduh di *Play Store* atau *App Store*.

3.2.2 Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI oleh Pemerintah

Sistem aplikasi *e-Government* disusun berdasarkan pendekatan fungsional layanan dari sistem pemerintahan yang harus diberikan oleh suatu Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya dan urusan administrasi serta fungsi lain yang berhubungan dengan kelembagaan Pemerintah Daerah, yang diperlukan guna terselenggaranya sistem pemerintahan daerah.

Fungsi-fungsi pelayanan, administrasi dan kelembagaan kemudian dikelompokkan dalam group-group block fungsi. Setiap group block fungsi terdiri dari 1 atau lebih modul fungsi yang mencerminkan kelompok dari unit fungsi yang lebih kecil. Dengan demikian modul adalah komponen dan merupakan bagian dari block fungsi. Dengan pendekatan ini, fungsi pemerintahan kemudian dikelompokkan menjadi block-block fungsi dasar umum (pelayanan, administrasi, manajemen, pembangunan, keuangan, kepegawaian) dan fungsi lainnya, khususnya yang berkaitan dengan fungsi kedinasan dan kelembagaan.

Di sisi lain, sistem aplikasi *e-Government* juga disusun berdasarkan pendekatan terhadap orientasi layanan yang disediakan sistem, apakah untuk internal pemerintahan atau masyarakat. Juga apakah fungsi utama sistem tersebut

terutama disajikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik instansi pemerintah tertentu atau untuk kebutuhan yang sifatnya umum dan/atau mendasar.

Mengingat pengembangan *e-Government* lingkupnya mencakup skala nasional, maka diperlukan kerangka komunikasi antar sistem *e-Government* untuk saling berhubungan dan saling bekerjasama (*GIF–Government Interoperability Framework*). Disamping itu, sistem *e-Government* lingkup fungsinya juga cukup besar (menyangkut semua hal yang berhubungan dengan pemerintahan) sehingga dalam pembangunannya hampir dapat dipastikan melibatkan banyak vendor, sehingga diperlukan mekanisme komunikasi baku antar sistem, sehingga masing-masing sistem aplikasi dapat saling bersinergi untuk membentuk layanan *e-Government* yang lebih besar dan kompleks. Oleh karena itu, dalam membangun sistem aplikasi *e-Government* diperlukan standarisasi kebutuhan pengembangan sistem aplikasi yang akan menjamin bahwa komunikasi antar sistem tersebut dapat dilakukan oleh siapapun vendor pengembang sistem.

Penerapan *E-Government* di Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah. Adanya *E-Government* lebih dapat dirasakan apabila warga masyarakat maupun pemerintah dapat menggunakan alat (media elektronik), seperti *handphone*, laptop, komputer dan media lain. Berdasarkan wawancara bersama Bapak Trio Beni Putra, SE, MM. selaku Kepala Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, beliau mengatakan:

“Harapan kami dengan adanya InPAS ini, maka hubungan yang efektif antara pengguna berjalan dengan baik, hanya saja kami terus perbaiki kendala di sistem ini. Karna ada beberapa kendala yang mengganggu sistem ini, salah satunya integrasi website kabupaten Indragiri Hilir.”
(Wawancara 06 Desember 2019)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa InPAS Kabupaten Indragiri Hilir bertujuan untuk memberikan hubungan pengguna yang efektif karena menggunakan sistem berbasis android. Hanya saja dalam implementasi pada sistem ini masih ada beberapa kendala, salah satunya belum terintegrasinya *website* Perangkat Daerah Kabupaten dan Kecamatan di www.inhilkab.go.id.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan satu langkah keseriusannya terhadap penerapan *E-Government* melalui dikeluarkannya Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 20 Tahun 2018 Tentang Manajemen Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, namun dukungan dari pejabat publik masih belum maksimal karena kurangnya pemahaman dari pejabat publik mengenai penerapan *E-Government* untuk menjalankan pemerintahannya.

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi komitmen pimpinan pada layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS diantaranya :

2. Kepala Perangkat Daerah tidak serius mendukung berjalannya Informasi Pemerintah dan Masyarakat.
3. Proses birokrasi pengajuan Surat Keterangan atau SK Bupati terlalu panjang mulai dari koreksi staf bagian hukum, asisten, Sekretaris Daerah atau Sekda dan apabila salah satu tidak ada ditempat akan memperlambat proses penandatanganannya.
4. Tidak tersedia secara langsung yang tertuang dalam APBD Tahun 2018 tentang Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS.

5. Bidang aplikasi kurang serius memberikan dukungan sebagai pejabat pengelola layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat.

3.2.3 Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintah

Aksesibilitas atau tingkat keterjangkauan aspek pada sumber-sumber berbagai organisasi dapat dilihat dari Sumber Daya pengelola Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS. Berdasarkan wawancara bersama Bapak Drs. H. M. Thaher, MM selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

“Bicara aksesibilitas, berarti bicara tingkat keterjangkauan. Tingkat keterjangkauan pengelola InPAS ini memang belum maksimal, bukan berarti tidak bisa berjalan dengan baik, hanya saja mengganggu proses pada sistem ini. Kita bisa lihat SDM yang memadai, Sumber daya finansial juga berpengaruh terhadap kelangsungan sistem InPAS ini. Apalagi jika ingin menerapkan e-government dengan pola city smart pasti memerlukan biaya yang besar.” Wawancara 09 Desember 2019)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah SDM yang kurang memadai sehingga menyebabkan tumpang tindih pekerjaan, SDM yang tersedia juga masih belum sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, yaitu SDM yang berbasis TIK. Contohnya penunjukan operator atau admin oleh Perangkat Daerah yang tidak sesuai *skill* atau kemampuan merupakan kendala yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu sumber daya finansial masih terbatas, sehingga kurang maksimal dalam penerapannya. Infrastruktur secara kuantitas sudah baik, namun secara kualitas masih kurang baik.

Tabel 3.9
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatkan kualitas SDM yang berbasis TIK untuk memberikan pelayanan informasi multimedia kepada publik yang terencana dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik dalam upaya transparansi kegiatan pemerintah daerah	Tersediannya aparatur yang handal dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui media	1. Pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat 2. Pameran 3. Aksetabilitas Informasi 4. Pendidikan dan Pelatihan Teknis/ Bimtek

Sumber: Renstra DiskominfoPS Kabupaten INHIL Tahun 2017-2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Misi Meningkatkan kualitas SDM yang berbasis TIK untuk memberikan pelayanan informasi multimedia kepada publik yang terencana dan akuntabel. Adapun indikator antara lain:

- a. Pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
- b. Pameran
- c. Aksetabilitas Informasi
- d. Pendidikan dan Pelatihan Teknis/ Bimtek

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif memiliki tujuan meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan baik. Sasaran dari kegiatan ini meningkatkan tranparansi penyenggaraan Pemerintahan. Berikut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Indikator Kinerja	Data Capaian	Tahun 2017		Tahun 2018	
			Target	Rp.	Target	Rp.
1.	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Teknis / Bimtek yang Terlaksanakan	7 kali	16 orang	328,36	66 kali	350,00

Sumber: Renstra DiskominfoPS Kabupaten INHIL Tahun 2017-2018

Pelatihan bagi aparatur merupakan suatu proses untuk mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar aparatur semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik dan sesuai dengan standar pekerjaan, yaitu biasanya merujuk pada pengembangan keterampilan bekerja dan dapat digunakan dengan segera.

Lebih lanjut, pendidikan memberikan pengetahuan tentang subjek tertentu, tetapi sifatnya lebih umum dan lebih terstruktur untuk jangka waktu yang lebih panjang. Pelatihan dan pengembangan merupakan usaha untuk mengurangi atau menghilangkan terjadinya kesenjangan antara kemampuan aparatur dengan yang dikehendaki instansi.

Pendidikan (formal) dalam suatu instansi adalah suatu proses pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan oleh instansi yang bersangkutan, sedangkan pelatihan (*training*) merupakan bagian dari suatu proses pendidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang atau kelompok orang.

Berdasarkan tabel diatas, data capaian yang dilakukan oleh Dinas Komunikas, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir hanya

7 kali. Sedangkan target pada Tahun 2018 yaitu 66 kali, hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa benar yang dikatakan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir bahwa Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi belum mencapai target yang ditentukan pada tahun awal perencanaan.

3.2.4 Ketersediaan Dana dan Anggaran

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan arah strategis pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Anggaran merupakan unsur yang cukup penting dalam melaksanakan program, tidak hanya dalam lingkungan pemerintahan tetapi juga dalam lingkungan privat atau swasta. Hal itu menjadi sebuah penentu terlaksana atau tidaknya sebuah program yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam hal pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi guna menjadikan aplikasi Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS) sebagai sarana penyebarluasan informasi publik tentu memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

Berdasarkan wawancara bersama Project Leader InPAS, Bapak Trio Beni adalah sebagai berikut:

“Masalah dalam implementasi atau penerapan InPAS ini adalah anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Tahun 2018 tidak tertuang secara langsung InPAS didalamnya, namun kami tetap menyingkronkan dan terus bersinergi dengan kegiatan lain.”
(Wawancara 06 Desember 2019)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala internal yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Proyek Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS tidak tersedia anggaran secara langsung yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018.

Berikut data kendala internal serta strategi mengatasi kendala adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Kendala Internal dan Strategi Mengatasi Kendala

No.	Masalah/ Kendala	Strategi Mengatasi
1.	Proyek InPAS ini tidak tersedia anggaran secara langsung yang tertuang dalam APBD Tahun 2018	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir akan menyingkronkan dan mensinergikan dengan kegiatan lain yang telah diterangkan pada APBD Tahun 2018.

Sumber: Dinas Kominfo PS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah tidak tersedianya anggaran secara langsung yang tertuang dalam APBD Tahun 2018, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir mengatasi masalah tersebut dengan strategi menyingkronkan dan mensinergikan dengan kegiatan lain yang telah diterangkan pada APBD Tahun 2018.

Sejauh ini Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan terobosan dan perkembangan yang cukup baik, namun memang belum maksimal. Keterbatasan anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ternyata menjadi salah satu

hambatan yang sejauh ini berpengaruh terhadap pengembangan aplikasi Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS).

Berikut tabel data anggaran Program Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi.

Tabel 3.12
Anggaran Program Pengembangan InPAS

No.	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Target	Rp.	Target	Rp.
1	50%	20%	988,46	22%	1,700,00
2	12 Bulan	10 Bulan	6,672,04	10 Bulan	6,900,00

Sumber: Renstra Dinas Kominfo PS INHIL

Berdasarkan tabel diatas, Program Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi dengan indikator kinerja program cakupan pengembangan sistem *e-government*. Data capaian pada tahun awal perencanaan mencapai 50% dengan waktu 12 bulan. Sedangkan target pada tahun 2017 hingga 2018 naik sebesar 2%. Berdasarkan data tersebut, meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi namun sistem InPAS ini terus terjadi peningkatan.

3.2.5 Perangkat Hukum

Peraturan (*regeling*) dan Keputusan (*beschikking*) sudah menjadi prinsip umum hukum (*general principe of law*). Program Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki perangkat hukum baik Peraturan maupun Keputusan, hal tersebut penulis sajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 3.13
Perangkat Hukum InPAS

No.	Peraturan (<i>Regeling</i>)	Keputusan (<i>Beschikking</i>)
1	Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 20 Tahun 2018 Tentang Manajemen Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 634/IX/HK-2017 tentang Penetapan Struktur dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan SK Rencana Capaian InPAS

Sumber: Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 20 Tahun 2018 Tentang Manajemen Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dasar hukum Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS. Pengaturan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran telah memberikan tantang besar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Maksud Peraturan ini terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Peraturan ini bermaksud untuk:

- a. Memberikan standar operasional manajemen pelayanan informasi dan dokumentasi publik bagi PPID Utama, PPID Pembantu PD di lingkungan Pemerintah Daerah dan Petugas Pengelola InPAS dalam memberikan pelayanan informasi publik;*
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Publik disetiap badan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah.*

Berdasarkan pasal 2 diatas, dapat diketahui bahwa Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 20 Tahun 2018 Tentang Manajemen Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dasar hukum Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS.

Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 634/IX/HK-2017 tentang Penetapan Struktur dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir tersebut menjelaskan tentang Struktur dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan wawancara bersama Bety Septika selaku anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

“Pengaturan kelembagaan yang digunakan oleh PPID ataupun Dinas Kominfo PS ialah Perbup dan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 634/IX/HK-2017. Karna di surat keputusan tersebut ada struktur, jadi kami kerja sesuai tupoksi.” (Wawancara 07 Desember 2019)

Berdasarkan wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan kelembagaan tentang Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Indragiri Hilir sudah ada, untuk layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS pun disesuaikan pada Struktur dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Indragiri Hilir.

Selain penjelasan mengenai perangkat hukum diatas, SK juga termasuk *Beschikking*. Berikut tabel mengenai kriteria keberhasilan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS.

Tabel 3.14
Kriteria Keberhasilan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan InPAS

No.	Kriteria Capaian	Rencana Capaian	Target
Jangka Pendek			
1.	Terbentuknya Tim Pengelola Program Aplikasi InPAS	SK Tim InPAS di tanda tangani kadis	100 %
2.	Tersedianya konsep dasar aplikasi	Draf konsep dasar aplikasi	100 %
3.	Tersedianya operator/ admin aplikasi InPAS disetiap OPD	SK operator InPAS	100 %
4.	Terlaksananya sosialisasi operator OPD	Daftar Hadir	100 %
5.	Terlaksananya pengujian dan penyempurnaan aplikasi InPAS	Terpenuhinya item pengujian aplikasi inPAS	100 %
6.	Terdaftarnya aplikasi InPAS di <i>Play Store</i>	Terdaftar	100 %
7.	Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	SK KIM ditanda tangani Kadis	100 %
8.	Tersedianya media tutorial	Terekam	100 %
9.	Terlaksananya sosialisasi ke publik tentang aplikasi InPAS	Terekspose	100 %
10.	Terlaksananya <i>launching</i> aplikasi InPAS	Acara <i>launching</i>	100 %
Jangka Menengah			
1.	Tersusunnya Perbup tentang aplikasi	Perbup di tanda tangani Bupati	100 %
2.	Tersedianya Bank Data Informasi aplikasi	Bank Data Informasi	80 %
3.	Tersedianya informasi pembangunan 2 berita setiap OPD perminggu	Berita dari OPD	100 %
4.	Tersusunnya SOP pengelolaan aplikasi	SOP di tanda tangani Sekda	100 %
5.	Terlaksananya lomba OPD dan Masyarakat Duta Informasi	Terlaksananya lomba	0 %
6.	Terlaksananya evaluasi akhir proses pengelolaan aplikasi InPAS	Dokumen hasil evaluasi	0 %
7.	Tersedianya anggaran sebagai <i>reward</i> bagi pemberi informasi	Anggaran InPAS di DPA 2019	0 %
Jangka Panjang			
Tersedianya Informasi yang aktual, cepat dan dipercaya menuju <i>Good Governance</i> dengankonsep <i>city smart</i>			

Sumber: Dinas Kominfo PS Kabupaten Indragiri Hilir

Tahapan kegiatan dan capaian jangka pendek, menengah dan panjang yang juga mencakup tentang proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai *output* dalam setiap tahapan.

3.2.6 Perubahan Paradigma

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) dan internet telah menjadi alat kekuatan untuk memikirkan kembali sistem pemerintahan dengan model yang baru. TI dan internet mendorong transformasi dari paradigma birokrasi tradisional (yang menekankan kepada standarisasi, rutinitas, spesialisasi, fokus internal dan kewenangan), menuju paradigma *e-government* (yang menekankan kepada membangun jaringan yang terkordinasi, kerjasama eksternal dan orientasi pelayanan kepada *customer/* masyarakat sebagai fokusnya). Sehingga TI menjadi salah satu elemen utama dalam mem-perbaiki sistem managerial pemerintahan. Sistem pemerintahan yang berbasis TI dan internet (*e-government*) banyak memberikan keuntungan bagi semua pihak, baik organisasi pemerintahan, antar organisasi pemerintah, organisasi bisnis dan masyarakat secara luas. Sehingga semua pihak dapat mencari dan mengetahui informasi serta melakukan transaksi dengan instansi pemerintah daerah kapan dan dimana saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu.

Kini, teknologi informasi komunikasi tidak dapat dipisahkan lagi dari sebuah organisasi, baik organisasi yang bergerak di dunia bisnis (*profit oriented*) maupun yang bergerak di dunia sosial (*non profit oriented*), tanpa berfikir berapa nilai investasi yang harus ditanamkan. Investasi di bidang teknologi informasi komunikasi merupakan masalah yang sulit bagi pimpinan organisasi. Di satu pihak mereka sadar dan berfikir bahwa sudah saatnya organisasinya memiliki

sistem informasi yang lebih baik dan tentunya di dukung oleh alat yaitu teknologi informasi komunikasi untuk menunjang sistem kerja bagi organisasi mereka. Tanpa memiliki TI yang cukup canggih, sulit pada lingkungan global ini untuk mampu bersaing atau memberikan pelayanan yang lebih baik kepada *customer*.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Drs. H. M. Thaher, MM selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

“Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menuntut perubahan pada pola dan cara dilaksanakannya kegiatan di segala sektor, industri, perdagangan, terutama pada sektor pemerintahan. Ketertinggalan sektor publik pada sektor privat mengakibatkan pemerintah saat ini mengadopsi e-government salah satunya InPAS ini”. (Wawancara 09 Desember 2019)

Kenyataan akan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menuntut perubahan pada pola dan cara dilaksanakannya kegiatan di segala sektor, industri, perdagangan, terutama pada sektor pemerintahan. Keterlibatan secara aktif dalam revolusi informasi, komunikasi dan teknologi akan menentukan masa depan kesejahteraan bangsa. Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang luas, dimana tidak terbatas pada bidang-bidang industri dan perdagangan saja, namun juga bidang-bidang lainnya seperti pertahanan, kesehatan, keamanan, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Penggunaan teknologi informasi komunikasi sangat menguntungkan apabila dibandingkan dengan sistem manual dan cara tradisional, sehingga dalam perkembangannya banyak negara di seluruh dunia telah menggunakan teknologi informasi komunikasi dalam melaksanakan manajemen sistem di pemerintahannya.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi membawa perubahan luar biasa bagi *privat sector* yang telah lebih dahulu mengadopsi dan

mengaplikasikan internet sebagai media komunikasi antar *privat sector* yang dikenal dengan nama *e-Commerce* dan dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa dan berakibat semakin tertinggalnya *public sector* yang masih menggunakan cara-cara tradisional dalam berkomunikasi dengan para stakeholder-nya, inilah yang memicu *public sector* untuk melahirkan *e-Government*.

Sebelum adanya aplikasi Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS, masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir banyak yang gagap teknologi (gaptek). Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir adalah keterbatasan informasi publik di lingkungan kabupaten Indragiri Hilir. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir mengimplemantasikan amanah Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan membuat terobosan yaitu aplikasi Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS. Melalui InPAS, hanya dengan satu sentuhan jari telunjuk, sekali klik, berbagai data dan informasi yang dibutuhkan siapa saja tentang Indragiri Hilir sudah ada dalam genggaman.

Berikut disajikan tabel perubahan paradigma sebelum dan sesudah adanya aplikasi Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 3.15
Perubahan Paradigma Masyarakat Sebelum dan Sesudah adanya InPAS

No.	Kegiatan	Sebelum	Sesudah
1	Menonton Gemilang TV	Televisi	Televisi, <i>Smartphone</i>
2	Mendengar Gemilang FM	Radio	Radio, <i>Smartphone</i>
3	<i>Website</i> www.inhilkab.go.id	<i>Website</i>	aplikasi <i>mobile</i> InPAS
4	Administrasi Kependudukan	<i>Offline</i>	<i>Offline</i> dan <i>online</i>
5	Bilik interaktif masyarakat dengan pemerintah setempat	<i>Offline</i>	<i>Offline</i> dan <i>online</i>

Sumber: Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya dengan mendownload aplikasi InPAS di *playstore*, siapapun akan bisa melihat dan mengikuti perkembangan apa saja di Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam aplikasi Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS ada tiga bilik informasi yang dapat diklik. Untuk televisi ada Gemilang TV, lalu radio dengan Gemilang FM dan *website* berita www.inhilkab.go.id. Ketiga media informasi tersebut sangat mudah diakses dan tanpa harus punya televisi atau radio. Cukup dengan *smartphone* atau gadget di tangan, informasi tentang Indragiri Hilir sudah dapat disimak setiap waktu dan dimanapun.

Selain media informasi, aplikasi InPAS juga dapat membantu masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), dan KTP tidak mesti berdesak-desakan mengurusnya ke Disdukcapil. Masyarakat dapat mendaftar dengan mengisi formulir yang disediakan oleh aplikasi InPAS. Tentu yang paling menarik dari aplikasi ini adanya bilik interaktif masyarakat dengan pemerintah setempat. Warga Indragiri Hilir yang ingin berkomunikasi dan mempertanyakan tentang berbagai persoalan kemasyarakatan dapat melakukan secara *online*. Mulai dari soal pengaduan jalan rusak sampai masalah lain terkait kepentingan publik di Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan daerah yang berinisiatif menerapkan *Electronic Government*, kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengamatan yang di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

- a. Di dalam menjalankan fungsi manajemennya terkait penerapan *E-Government* melalui layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS, bahwa inisiatif *E-Government* belum menunjukkan tahap kesempurnaan. Di dalam manajemen penerapan *E-Government* masih terdapat beberapa kelemahan yang dilihat dengan empat fungsi manajemen pemerintahan. Fungsi yang pertama yaitu perencanaan pemerintahan, pada proses ini di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir telah memuat tujuan dari Informasi Pemerintah dan Masyarakat yaitu keterbukaan informasi publik melalui pelayanan berbasis teknologi. Pada fungsi yang kedua yaitu proses pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan, bahwa anggota tim pengelola layanan Informasi Pemerintah dan Msyarakat (InPAS) jumlahnya belum mencukupi serta SDA dan anggaran tidak tertuang secara langsung pada APBD Tahun 2018. Fungsi yang ketiga yaitu proses penggunaan sumber-sumber pemerintahan dalam InPAS, Menurut temuan lapangan, proses pembinaan dari atasan kepada bawahan di dalam menerapkan *E-Government* masih kurang maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman pemimpin mengenai *E-Government* suatu pemerintahan

daerah untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel (*good governance*). Fungsi yang keempat adalah proses kontrol pemerintahan, proses pengawasan dan penilaian. Kegiatan dalam *monitoring* dan evaluasi di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sudah berjalan optimal, karena dilakukan secara informal meski terdapat berbagai permasalahan akan tetapi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sudah menyiapkan tindakan yang akan dilakukan untuk menangani masalah tersebut.

- b. Faktor penentu tingkat kesiapan *E-Government* pada layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS di Kabupaten Indragiri Hilir terpenuhi ialah Perangkat Hukum. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Perbup tentang InPAS dan Surat Keputusan Bupati serta tersusunnya SOP pengelolaan InPAS. Sselain itu, indikator lain masih memiliki kendala. Diantarnya faktor yang menghambat keberhasilan penerapan Informasi Pemerintah dan Masyarakat ialah Infrastruktur Telekomunikasi yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam menerapkan InPAS, Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI oleh Pemerintah, Kesiapan SDM di Pemerintah, Ketersediaan Dana dan Anggaran serta Perubahan Paradigma.

4.2 Saran

- a. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir segera merencanakan pengelolaan *E-Government* melalui layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS agar bisa menuju proses selanjutnya, yaitu tingkat pematangan yang di dalam aplikasi Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS terdapat interaksi, sehingga bisa mewujudkan proses pelayanan publik melalui penerapan *E-Government* dengan konsep *smart city*.
- b. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir harus memperhatikan faktor penentu tingkat kesiapan *E-Government* pada layanan InPAS seperti Infrastruktur Telekomunikasi, Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI oleh Pemerintah, Kesiapan SDM di Pemerintah, Ketersediaan Dana dan Anggaran serta Perubahan Paradigma.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Arief, M. (2016). *Framework Masterplan E-Governement Pemerintah Kabupaten-Kota*. Jakarta: BPPT Press.
- Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Gunawan, C. I. (2015). *Sistem Informasi Manajemen dan E-Government*. Purwokerto: CV. IRDH.
- Indrajid, R. E. (2005). *e-Government in Action*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Indrajid, R. E. (2016). *Tata Kelola Teknologi Informasi*. Yogyakarta: The Preinexus Indonesia.
- Indrayani, E. (2013). *Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan: Konsep dan Aplikasinya pada Organisasi Pemerintahan/ Pemda*. Bandung: IPDN Press.
- Nawawi, Z. (2013). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ndraha, T. (2011). *Kybermologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurman. (2017). *Strategi Pembangunan Daerah*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan-Peraturan :

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

Instruksi Presiden No. 6/2001 tanggal. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintahan harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi.

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 20 Tahun 2018 Tentang Manajemen Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 634/IX/HK-2017 tentang Penetapan Struktur dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

LAMPIRAN



Bapak Trio Beni Putra, SE, MM. selaku Kepala Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi



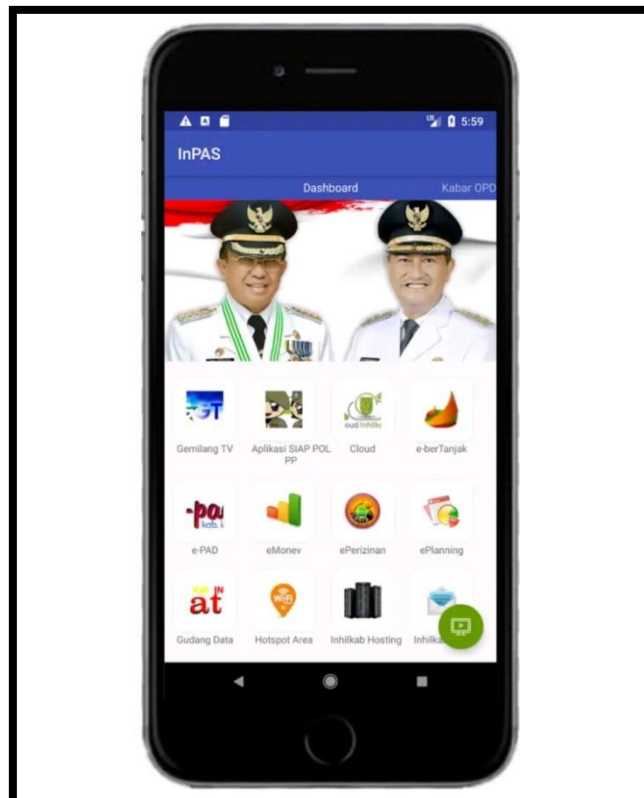
Bapak Trio Beni Putra, SE, MM. Selaku *Project Leader* InPAS



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hilir



Gambar Halaman Depan InPAS



Gambar *Dashboard* InPAS